



LAMPIRAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

- 1.IKK.III.1
- 2.IKK.III.2
- 3.IKK.III.3



IKK.III.1
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD
TAHUN 2019



A. Indikator Kinerja Kunci

Tataran Pengambil Kebijakan

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN: III.1 FORMAT UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : BANTUL

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg Ketertiban Umum	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	ADA: PERDA Nomor : 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	Ada
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2019, sebanyak 125.815 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak 264.559 Unit.	$\frac{125.815}{264.559} \times 100\% = 47,56 \%$

¹ Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukiman maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
			3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	ADA: PERDA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Ada
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 718.179 jiwa - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP = 721.687 jiwa	$\frac{718.179}{721.687} \times 100\% = 99.51\%$
			5	Pengurusan KIA	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA	- Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 174.204 - Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA sebanyak 227.638	$\frac{174.204}{227.638} \times 100\% = 76,53\%$
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir Tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 49 orang - Penduduk pada akhir Tahun 2019, berjumlah = 949.325 orang	$\frac{49}{10.000} \times 100\%$ = 0,49 % per 10.000 penduduk

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
		Kebijakan bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penanganan Bencana	<p>ADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Tahun 2013 Nomor Tentang Kesiapsiagaan Dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Daerah Tahun 2015 Nomor 14 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Tentang Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 10 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 	Ada
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	<p>ADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 	Ada

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal 30 April 2020 sesuai surat pengantar Nomor : 130/01827 Tanggal : 24 April 2020	Tepat
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal 6 Maret 2020 sesuai surat pengantar Nomor : 700/00124/BKAD Tanggal : 05 Maret 2020	Tepat
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	ADA: 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal); 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2020-2024.	Ada
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per Tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak 52 MOU yang terdiri dari: 1). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul DIY dan Pemerintah Kabupaten	52 MOU/Perjanjian Kerja Sama

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, 07/MoU/Bt/2014, 1 Juni 2014.</p> <p>2). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi Gajah Mati SP. 7 Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, No. 02.1/OK/Bt/2014, 7 Januari 2014.</p> <p>3). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, No. 02.1.1/PK/Bt/2014, 22 Januari 2014.</p> <p>4). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Mahalona SP 4 Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan, No. 08/PK/Bt/2014, 24 Juni 2014.</p> <p>5). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, No. 16.1/PK/Bt/2014, 24 November 2014.</p> <p>6). Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan, No. 18/PK/Bt/2014, 18 Desember 2014.</p> <p>7). Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perbatasan, No. 19/PK/Bt/2014, 18 Desember 2014.</p> <p>8). Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Dan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat, No. 16.1/PK/Bt/2015, 21 April 2015.</p> <p>9). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Tanjung Buka SP 6 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, No. 32.2/PK/Bt/2015, 8 September 2015.</p> <p>10). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Anawua</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 32.3/PK/Bt/2015, 5 Oktober 2015.</p> <p>11). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul DIY dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dari Kabupaten Bantul DIY ke Lokasi Transmigrasi UPT Simpang Tiga SP 5 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, No. 38.1/PK/Bt/2015, 22 Desember 2015.</p> <p>12). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Pirian Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, No. 38.2/PK/Bt/2015, 19 November 2015.</p> <p>13). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, No. 47/PK/Bt/2016, 20 Oktober 2016.</p> <p>14). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah dalam Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Bidang Pariwisata untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertukaran Kunjungan Wisata Pelajar, No. 10/MoU/Bt/2017, 22 Maret 2017.</p> <p>15). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Kerjasama dibidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, No. 19.1/MoU/Bt/2017, 4 September 2017.</p> <p>16). Kesepakatan Bersama antara</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul Dan Pemerintah Kabupaten Bulungan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, No. 37/MoU/Bt/2017, 23 November 2017.</p> <p>17). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Kerja Sama di bidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, No. 40/MoU/Bt/2017, 18 Desember 2017.</p> <p>18). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, No. 42/MoU/Bt/2017, 18 Desember 2017.</p> <p>19). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Kerja Sama Pertukaran Wisata Pelajar, No. 02/PK/Bt/2017, 11 Februari 2017.</p> <p>20). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur tentang Pertukaran Wisata Pelajar, No. 03/PK/Bt/2017, 22 Februari 2017.</p> <p>21). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tentang Pertukaran Wisata Pelajar, No. 04/PK/Bt/2017, 22 Februari 2017.</p> <p>22). Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Bukit Aren Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, No. 31.4/PK/Bt/2017, 23 Mei 2017.</p> <p>23). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi UPT Kabera Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, No. 31.5/PK/Bt/2017, 23 Mei 2017.</p> <p>24). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, No. 59.1/PK/Bt/2017, 11 September 2017.</p> <p>25). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul DIY dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP.5 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, No. 59.2/PK/Bt/2017, 23 Oktober 2017.</p> <p>26). Kesepakatan Bersama Pemerintah</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, Perekonomian, dan Pemberdayaan Masyarakat, No. 03/MoU/Bt/2018, 5 Maret 2018. 27). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, No. 05/MoU/Bt/2018, 2 April 2018. 28). Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, No. 14/MoU/Bt/2018, 31 Mei 2018. 29). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, No. 03/PK/Bt/2018, 9 Februari 2018. 30). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>tentang Penyelenggaraan Tes Psikologi, No. 08/PK/Bt/2018, 27 Maret 2018.</p> <p>31). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul di Kabupaten Grobogan, No. 09/PK/Bt/2018, 13 April 2018.</p> <p>32). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Atuan Permukiman Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, No. 16/PK/Bt/2018, 4 Mei 2018.</p> <p>33). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Satuan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Permukiman Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kawasan Gerbang Kayong Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, No. 17/PK/Bt/2018, 4 Mei 2018.</p> <p>34). Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Kabera Kawasan Transmigrasi Bungku Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, No. 19/PK/Bt/2018, 4 Mei 2018.</p> <p>35). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kawasan Transmigrasi Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, No. 29.2/PK/Bt/2018, 16 Juli 2018.</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>36). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Sandalan Desa Pancakarsa I Kecamatan Taluditi Kawasan Transmigrasi Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, 35/PK/Bt/2018, 2 Oktober 2018.</p> <p>37). Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro, No. 22/MoU/Bt/2019, 21 Agustus 2019</p> <p>38). Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jendral Penyiapan Kawasan dan pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktur Jendral Pengembangan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Kepala dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka Satuan Permukiman 6B Kawasan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Transmigrasi Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Penempatan Tahun 2019, No:03/PK/Bt/2019, 25 Januari 2019.</p> <p>39). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2019, No:04/PK/Bt/2019, 01 Februari 2019</p> <p>40). Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial, No:10/PK/Bt/2019, 15 Mei 2019</p> <p>41). Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman Salundeang Kawasan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, No: 18.1/PK/Bt/2019, 21 Juni 2019</p> <p>42). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pengembangan <i>Smart City/Smart Regency</i> untuk mewujudkan <i>Jogja Smart Province</i> No: 27/PK/Bt/2019</p> <p>43). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi, No: 28/PK/Bt/2019, 26 Juli 2019</p> <p>44). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kawasan Transmigrasi Silaut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Tahun 2019, No: 47/PK/Bt/2019, 26 Agustus 2019</p> <p>45). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Tahun 2019, No: 48/PK/Bt/2019, 26 Agustus 2019</p> <p>46). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi, No: 49/PK/Bt/2019, 02 September 2019</p> <p>47). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa, No: 52/PK/Bt/2019, 20 September 2019.</p> <p>48). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi Watutinawu Kecamatan Laota Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, No:55/PK/Bt/2019, 26 September 2019.</p> <p>49). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						<p>Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, No: 59/PK/Bt/2019, 18 Oktober 2019</p> <p>50). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan III yang diangkat dari Tenaga Honoer Kategori K2 Tahun 2019, No: 62/PK/Bt2019, 23 Oktober 2019</p> <p>51). Perjanjian Kerja Sama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Koperasi dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Pembangunan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						Daerah, No: 63/PK/Bt/2019, 28 Oktober 2019 52). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan, No:89/PK/Bt/2019, 30 Desember 2019	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 5 prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 program/agenda prioritas. 	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019 (APBD) = 24 urusan.	$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019	TEPAT: PERDA Nomor : 22 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Tanggal 31 Desember 2018	Tepat

² Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	PERDA Nomor : 10-Tahun 2007-tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kab bantul	Ada
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp.689.569.698.970,51 2) Urusan Kesehatan Rp.393.867.760.520,26 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.187.400.069.959,00 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.2.772.294.045,00 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp.35.254.933.707,00 6) Urusan Sosial Rp.18.371.934.829,20 Total Belanja pelayanan dasar Rp.1.327.236.692.030,97 Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. 2.284.063.006.481,63	$\frac{\text{Rp. 1.327.236.692.030,97}}{\text{Rp. 2.284.063.006.481,63}} \times 100\%$ = 58,11%
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019 1) Urusan Pendidikan Rp.689.569.698.970,51 2) Urusan Kesehatan Rp.393.867.760.520,26	$\frac{\text{Rp. 1.083.437.459.490,77}}{\text{Rp. 2.284.063.006.481,63}} \times 100\%$ =47,43 %

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
					Jumlah total belanja X 100%	Total Belanja Pend & Kes Rp.1.083.437.459.490,77 Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Ada a) Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; b) Perbup Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik	Ada
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS kabupaten Tahun 2019 sebanyak 8.011 orang. - Jumlah penduduk kabupaten Tahun 2019 sebanyak 949.325 orang.	$\frac{8.011}{949.325} \times 100 \% = 0,84\%$
			21	Rasio PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	- Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) 1.978 orang - Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 8.011 orang	$\frac{1.987}{8.011} \times 100 \% = 24,80 \%$
		Kelembagaan	22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Sekretariat Daerah = 1 unit	45 unit

³ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
					Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016	2) Sekretariat Dewan = 1 unit 3) Inspektorat = 1 unit 4) Dinas = 19 unit 5) Badan = 4 unit 6) RSUD = 1 unit 7) Lembaga Teknis lainnya = 1 unit 8) <u>Kapanewon</u> = 17 unit Σ Perangkat Daerah = 45 unit Berdasarkan: 1. Perda No 10 Tahun 2018 ttg Pembentukan & Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2. Perda No 8 Tahun 2019 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 16 Perda (Daftar terlampir)	16 PERDA
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan Tahun 2019	- RAPERDA yang disetujui Tahun 2019, sebanyak 16 RAPERDA - RAPERDA yang diusulkan DPRD Tahun 2019 sebanyak 16 PERDA.	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam Tahun 2019 x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam Tahun 2019, sebanyak 65 keputusan. - Keputusan DPRD dalam Tahun 2019, sebanyak 65 keputusan. 	$\frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam Tahun 2019 x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Tahun 2019, sebanyak 508 keputusan. - Keputusan Bupati Tahun 2019, sebanyak 508 keputusan. 	$\frac{508}{508} \times 100\% = 100\%$
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam Tahun 2019 x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 132 Perbup. - Peraturan Bupati dalam Tahun 2019, sebanyak 132 Perbup. 	$\frac{132}{132} \times 100\% = 100\%$
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Perda yang dibatalkan 0 - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 0 	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	ADA, Dasar hukumnya adalah. Perda Kabupaten Bantul No.07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Konsultasi Publik). Perda Kabupaten Bantul nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	Ada
	UNTUK DAERAH KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	ADA, Sebutkan Nama Mediana : 1. Situs Pemerintahan www.bantulkab.go.id 2. dikpora.bantulkab.go.id 3. social.bantulkab.go.id 4. pariwisata.bantulkab.go.id 5. dipertautkan.bantulkab.go.id 6. pu.bantulkab.go.id 7. dinkes.bantulkab.go.id 8. disdukcapil.bantulkab.go.id 9. dishub.bantulkab.go.id 10. nakertrans.bantulkab.go.id 11. diskukmp.bantulkab.go.id 12. dppkbpmd.bantulkab.go.id 13. disbud.bantulkab.go.id 14. dptr.bantulkab.go.id	Ada

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						15. diskominfo.bantulkab.go.id 16. dpk.bantulkab.go.id 17. satpolpp.bantulkab.go.id 18. dpmppt.bantulkab.go.id 19. dlh.bantulkab.go.id 20. perdagangan.bantulkab.go.id 21. bappeda.bantulkab.go.id 22. bkpp.bantulkab.go.id 23. bkad.bantulkab.go.id 24. bpbd.bantulkab.go.id 25. inspektorat.bantulkab.go.id 26. kesbangpol.bantulkab.go.id 27. setda.bantulkab.go.id 28. dprd.bantulkab.go.id 29. rsudps.bantulkab.go.id 30. ulp.bantulkab.go.id 31. kec.bambanglipuro.bantulkab.go.id 32. kec.banguntapan.bantulkab.go.id 33. kec.bantul.bantulkab.go.id 34. kec.dlingo.bantulkab.go.id 35. kec.imogiri.bantulkab.go.id 36. kec.jetis.bantulkab.go.id 37. kec-kasihan.bantulkab.go.id 38. kec.kretek.bantulkab.go.id 39. kec.pajangan.bantulkab.go.id 40. kec-pandak.bantulkab.go.id 41. kec-piyungan.bantulkab.go.id 42. kec-pleret.bantulkab.go.id	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						43. kec-pundong.bantulkab.go.id 44. kec-sanden.bantulkab.go.id 45. kec-sedayu.bantulkab.go.id 46. kec-sewon.bantulkab.go.id 47. kec-srandakan.bantulkab.go.id 48. hukum.bantulkab.go.id 49. lpse.bantulkab.go.id 50. sistel.bantulkab.go.id Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 Tentang: Standar Operasional Prosedur Pengembangan Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DANA PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. 1.351.157.100.831,00 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.388.065.951.692,00	$\frac{\text{Rp}1.351.157.100.831,00}{\text{Rp}1.388.065.951.692,00} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 97,34 %</p>
		Alokasi Belanj pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD Tahun 2019, sebesar Rp.1.103.811.457.314,63 - DAU Tahun 2019, sebesar Rp.1.015.302.849.000,00	$\frac{\text{Rp}1.103.811.457.314,63}{\text{Rp}1.015.302.849.000,00} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 108,72 %</p>

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total realisasi belanja langsung APBD Tahun 2019, sebesar Rp.1.103.811.457.314,63 - Total Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63 	$\frac{\text{Rp}1.103.811.457.314,63}{\text{Rp}2.284.063.006.481,63} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 48,33 %</p>
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.505.929.472.001,63 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.2.269.539.168.277,63 	$\frac{\text{Rp}505.929.472.001,63}{\text{Rp}2.269.539.168.277,63} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 22,29 %</p>
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: WTP 	Opini tahun 2018 = WTP Opini Tahun 2019= WTP
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - SILPA Tahun 2019, sebesar Rp.233.569.667.714,40 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.2.269.539.168.277,63 	$\frac{\text{Rp}233.569.667.714,40}{\text{Rp}2.269.539.168.277,63} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 10,29 %</p>
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63 	$\frac{\text{Rp}2.284.063.006.481,63}{\text{Rp}2.504.062.661.991,45} \times 100\%$

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
					anggaran belanja APBD X 100%	- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp.2.504.062.661.991,45	= 91,21 %
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2019	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 641 temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2019 sebanyak 741 temuan.	$\frac{641}{741} \times 100\% = 86,50\%$
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp.505.929.472.001,63 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 Rp.464.070.079.956,00 (sesuai RKPD)	$\frac{\text{Rp}505.929.472.001,63}{\text{Rp}464.070.079.956,00} \times 100\%$ = 109,2 %
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2017 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp.505.929.472.001,63 - Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp.462.653.956.229,75	$\frac{\text{Rp}43.275.515.771,88}{\text{Rp}462.653.956.229,75} \times 100\%$ = 9,35%
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh	Penghargaan yang diterima, sebanyak 15 penghargaan yang terdiri dari: 1. Gold Award Kategori Inovasi	15 Penghargaan

⁴ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
	PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH			Pemda dalam Tahun 2019	Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	<p>SPGDT (Inovasi SIGAP PSC 119 Bantul) oleh INdoHCF Innovation Awards III-2019</p> <p>2. Penganugerahan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</p> <p>3. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</p> <p>4. Penghargaan sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan hasil dari rangkaian implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 oleh NQA Indonesia</p> <p>5. Juara I Stand Terbaik pada Gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2019 yang diselenggarakan oleh PT.Aira Mitra Media di Mega Mall Center, Batam, Kepulauan Riau</p> <p>6. Juara III Stand Terbaik pada Bali Tourism Trade Investment Expo yang diselenggarakan oleh PT.Aira Mitra Media di Mall Level 21 Bali</p> <p>7. Apresiasi Kepala Daerah oleh Kemapan RB terhadap tiga Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul (Disdukcapil, RSUD, dan Dinas Penanaman Modal dan</p>	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
						Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 8. Peringkat Pertama dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan 9. Peringkat Pertama dengan Kinerja Terbaik dalam Input Data Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan 10. Peringkat Terbaik Sistem Manajemen Keuangan tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan 11. Pemecahan Rekor Pemberian KIA sebanyak 10.169 Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2019 oleh MURI 12. Peringkat Terbaik Kegiatan Bunda PAUD Tahun 2019 oleh Kemendikbud RI 13. 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Kemen PANRB 14. 50 Smart City di Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian KOMINFO 15. Satuan Pendidikan Aman Bencana oleh ASEAN Save School Initiative kepada SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran tahun 2019.	

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Penerapan E-procurement mulai pada bulan Januari tahun 2010 ditetapkan dalam Keputusan Bupati No.3 Tahun 2017	Ada
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah izin investasi dalam Tahun 2019	Persetujuan izin investasi pada Tahun 2019, sebanyak 482 ijin	482 ijin

IKK.III.2

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD
TAHUN 2019**



B. Indikator Kinerja Kunci

Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Urusan Wajib dan Pilihan

lampiran III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Pendidikan
- Kepemudaan dan Olah Raga (PORA)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program PAUD Anggaran Rp2.742.417.500,- Realisasi Rp2.605.731.994,- 2. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Anggaran Rp141.931.817.572,- Realisasi Rp132.966.097.038,66 3. Program Pendidikan	1. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Anggaran Rp818.165.000,00 Realisasi Rp758.435.000,00 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan Anggaran	6 Program	6 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Non Formal Anggaran Rp1.481.470.000,00 Realisasi Rp1.378.745.800,00 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anggaran Rp48.374.377.700,00 Realisasi Rp46.274.461.500,00 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Anggaran Rp739.675.000,00 Realisasi Rp646.718.747,85 6. Program peningkatan nilai akademik Anggaran Rp3.512.475.000,00 Realisasi Rp3.388.056.400,00	Rp2.452.889.500,00 Realisasi Rp2.392.087.000,00 3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Anggaran Rp59.410.000,00 Realisasi Rp59.410.000,00 4. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Anggaran Rp78.496.780,00 Realisasi Rp78.496.780,00 5. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Anggaran Rp9.532.298.924,00 Realisasi Rp9.298.545.300,00 6. Program peningkatan sarpras olahraga Anggaran		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
							Rp6.094.936.974,00 Realisasi Rp5.345.412.260,50		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 22 SOP terdiri dari: 1. SOP Permohonan NPSN 2. Sop Pemberian Informasi Data Pendidikan 3. SOP Penjaringan Data Pendidikan 4. SOP Operasional Sekolah Baru 5. SOP Songsong UNAS SD/Try Out 6. SOP Pembangunan Ruang Perpustakaan 7. SOP Rehab ruang Kelas 8. SOP Pengadaan Barang dan Jasa smp 9. SOP Pengawasan Sarana dan Prasarana SMP 10.SOP Penyaluran BOP SMP 11.SOP Pendataan Sarana dan Prasarana SMP	Ada 1 SOP terdiri dari: 1. Ada 1 SOP yaitu SOP Pembinaan Bakat Minat dan Kreatifitas Siswa OOSN/Olah	22 SOP	1 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						12.SOP Kebutuhan PTK SMP 13.SOP Pelayanan Rekomendasi Penambahan Jam di sekolah lain 14.SOP Penjaminan Mutu Pendidikan SMP 15.SOP Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Dinas 16.SOP Pelayanan Bantuan Sosial Pendidikan 17.SOP Pemeliharaan Kebersihan dan Kenyamanan Kantor 18.SOP Pengelolaan Perpustakaan Kantor 19.SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan KGB 20.SOP Pengajuan Usul Ijin Belajar/tugas belajar 21.SOP Pengumpulan Data Kinerja DI 17 UPT 22.SOP Pengumpulan			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Data Kinerja Dikdas			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 5. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada	- Jabatan yang terisi sebanyak 21 - Jabatan yang ada, sebanyak 21	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					x 100%				
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional 1. Guru, 2. Pengawas TK 3. Pengawas SD, 4. Pengawas SMP 5. Pustakawan 6. Pranata Komputer	Tidak ada	Ada 6 jabatan	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 4442 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak <u>8.011</u> personel	- PNSPerangkat daerah, sebanyak 11 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak <u>8.011</u> personel	55,45 %	0,14 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 4 org - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Pejabat yang mengikuti kepengkatan	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				persyaratan kepangkatan	dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah – RENSTRA Perangkat Daerah – RENJA Perangkat Daerah – RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%				
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dlm RKA Perangkat Daerah dibagi jml program dlm RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yg diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 6 program.	100 %	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp730.075.235.101,00 - Total Belanja APBD,	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp19.036.197.178,00 - Total Belanja APBD,	29,16 %	0,76 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						sebesar Rp2.504.062.661.991,45	sebesar Rp.2.504.062.661.991,45		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp689.569.698.971,51 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.17.932.386.340,50,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	30,19 %	0,79 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp195.397.271.439,51 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp689.569.698.971,51	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp17.932.386.340,50 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.17.932.386.340,50,-	28,34%	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp494.172.427.532 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp689.569.698.971,51	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.17.932.386.340,50	71,66%	%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan keuangan	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	1. Neraca 2. CALK 3. LRA	1. Neraca 2. CALK 3. LRA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp656.157.427.684,00	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp656.157.427.684,00	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Media Elektronik 3. Leaflet 4. Brosur 5. Website, email	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Media Elektronik 3. Leaflet 4. Brosur 5. Website, email	Jumlah sbyk 5 jenis.	Jumlah sbyk 5 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Pendidikan	Urusan PORA	Urusan Pendidikan	Urusan PORA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				5. Mass Media					
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Kesehatan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Kesehatan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 15 program : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan – Anggaran Rp 6.159.511.021,00 – realisasi Rp 6.145.191.659,00 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat – anggaran Rp84.870.200.237,00 – realisasi Rp81.174.843.542,41 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan – anggaran Rp185.000.000,00 – realisasi Rp178.951.500,00 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat – Anggaran Rp1.950.450.000,00 – realisasi Rp1.875.265.030,00 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat – anggaran Rp2.612.157.000,00 – realisasi Rp2.442.692.850,00	15 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> – anggaran Rp3.820.391.000,00 – realisasi Rp3.362.083.100,00 <p>7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <ul style="list-style-type: none"> – anggaran Rp1.311.362.500,00 – realisasi Rp989.806.231,00 <p>8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anggaran Rp1.402.522.300,00 – realisasi Rp1.301.677.497,00 <p>9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anggaran Rp24.054.473.000,00 – realisasi Rp23.333.771.173,00 <p>10.10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</p> <ul style="list-style-type: none"> – anggaran Rp16.470.743.900,00 – realisasi Rp15.762.086.230,85 <p>11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> – anggaran Rp460.140.000,00 – realisasi Rp453.645.772,00 <p>12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</p> <ul style="list-style-type: none"> – anggaran Rp164.720.000,00 – realisasi Rp163.220.000,00 	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						13. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia – anggaran Rp147.000.000,00 – realisasi Rp138.684.992,00 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak – anggaran Rp5.035.920.058,00 – realisasi Rp2.110.373.361,00 15. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular – anggaran Rp1.869.610.892,00 – realisasi Rp1.790.406.000,00	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, 134 SOP, yang terdiri dari: 1. SOP Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit = 12 2. Bidang pelayanan kesehatan = 13 3. Bidang Kesehatan masyarakat = 22 4. Bidang Sumber daya kesehatan = 26 5. Sekretariat ISO = 27 6. Sekretariat Dinas Kesehatan = 34	Ada 134 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana	Ada 7 Perda

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. perda no 19 tahun 2018 ttg perubahan atas perda kab Bantul no 11 tahun 2016 ttg rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021</p> <p>4. perda no 12 tahun 2017 ttg jaminan kesehatan daerah</p> <p>5. Perda no 14 tahun 2010 ttg pengawasan kualitas air</p> <p>6. Perda no 2 tahun 2016 ttg perubahan kedua atas perda kab Bantul no 9 tahun 2011 ttg retribusi jasa umum</p> <p>7. Perda no 9 tahun 2013 ttg penyelenggaraan pelayanan dan perijinan di bidang kesehatan</p>	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 50 - Jabatan yang ada, sebanyak 50	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur	Ada, 16 jabatan fungsional 1. Dokter	Ada 16 jabatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				struktur organisasi Perangkat Daerah	organisasi Perangkat Daerah	2. Dokter Gigi 3. Perawat 4. Perawat Gigi 5. Bidan 6. Apoteker 7. Asisten Apoteker 8. Nutrisionis 9. Rekam Medik 10. Fisioterapis 11. Promotor Kesehatan/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat 12. Sanitarian 13. Pranata LabKes/ Ahli teknologi Lab medik (ATLM) 14. Epidemiologi 15. Radiografer 16. Teknisi Elektomedis	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak 1.088 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	13,58 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 32 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 50 org.	64 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perangkat daerah yang ada x 100%		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Pejabat yang mengikuti kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak 50 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 50 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 15	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp224.889.611.100,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	8,98 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp213.815.605.426,26 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	9,36 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp147.929.989.784,26 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp213.815.605.426,26	69,19 %
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp65.885.615.642,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp213.815.605.426,26	30,81 %	
	Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp63.764.153.830,14	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Leaflet 2. Pengumuman di media masa 3. Poster 4. Buku Saku 5. Stiker 6. Spanduk 7. ILM radio 8. ILM TV 9. Pameran Pembangunan 10. Karnaval 11. Kampanye Kesehatan 12. Baliho 13. Board Game 14. Media Sosial	Jumlah sbyk 14 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

RSUD Panembahan Senopati

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Kesehatan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan pegadaan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata – Anggaran : Rp23.471.640.000,00 – realisasi : Rp23.264.636.995,00 2. Program Peningkatan pelayanan rumah sakit – Anggaran : Rp129.476.842.479,00 – Realisasi Rp126.729.823.804,00	2 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 1.823 terdiri dari: (contoh) 1. SOP pendaftaran pasie rawat jalan dengan telpon pada hari H 2. SOP pendaftaran pasien rawat inap 3. SOP pembuatan data individual morbiditas penyakit (RL 4a dan RL4b) 4. SOP pembuatan laporan RL5 5. SOP anjungan pendaftaran mandiri	Ada 1.823 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6. SOP pendaftaran pasien dengan WA 7. SOP sensus harian rawat inap 8. SOP pendistribusian berkas rekam medis pasien rawat jalan dan OGD 9. SOP pendaftaran pasien perjanjian 10. SOP pendaftaran pasien dengan SMS	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 20 - Jabatan yang ada, sebanyak 20	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional 1. Arsiparis 2. Dokter 3. Dokter gigi 4. Dokter pendidik klinis 5. Bidan tingkat ahli	Ada 6 jabatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6. Bidan tingkat terampil 7. Apoteker 8. Asisten apoteker 9. Fisioterapis tingkat ahli 10. Fisioterapis pelaksana 11. fisioterapis tingkat terampil 12. Nutrisionis pelaksana 13. Nutrisionis ahli pertama 14. Nutrisionis ahli muda 15. Nutrisionis tingkat terampil 16. Perawat pelaksana 17. Perawat mahir 18. Perawat gigi terampil 19. Perawat gigi mahir 20. Perawat gigi penyelia 21. Perekam medis pelaksana 22. Perekam medis pelaksana lanjutan 23. Perekam medis penyelia 24. Teknisi elektromedik pelaksana 25. Teknisi elektromedik penyelia 26. Analis pelaksana 27. Nalis penyelia 28. Analis ahli 29. Okupasi terapis pelaksana 30. Radiografer pelaksana 31. Sanitarian penyelia 32. Sanitarian ahli	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 492 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011	6,14 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait			Kabupaten	personil	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	85 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Pejabat yang mengikuti kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RKA 2. RBA 3. RKT	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				program RENJA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp183.749.328.975,00 - Total Belanja APBD, sebesar	7,34 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					100%	Rp2.504.062.661.991,45	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp180.052.155.095,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	7,88 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp149.994.460.799,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp180.052.155.095,00	83,31 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp30.057.694.296,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp180.052.155.095,00	16,69 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Sebutkan Inventaris Barang	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp276.726.914.430,28	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4.Website 5.Vidiotron 6.Media sosial	Jumlah sbyk 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Pekerjaan Umum (PU)
- Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan anggaran Rp2.667.513.000,00 realisasi Rp2.243.752.000,00 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya anggaran Rp19.639.796.950,00 realisasi Rp18.127.216.505,00 3. Program penyediaan dan pengelolaan air	1. Program pengembanaan perumahan anggaran Rp1.457.628.422,00 realisasi Rp1.412.430.045,00 2. Program lingkungan sehat perumahan anggaran Rp756.275.000,00 realisasi Rp732.790.000,00 3. Program pengelolaan areal pemakaman anggaran Rp797.800.000,00 realisasi Rp627.074.000,00	11 Program	3 Program

N O	ASPEK	FOKUS	N O	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						baku anggaran Rp133.750.000,00 realisasi Rp132.065.000,00 4. Program pengembangan,penge lolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya anggaran Rp1.358.825.000,00 realisasi Rp1.323.485.000,00 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah anggaran Rp15.307.328.200,00 realisasi Rp14.882.342.000,00 6. Program pengendalian banjir anggaran Rp15.522.509.800,00 realisasi Rp14.294.826.000,00 7. Program pembangunan gedung			

N O	ASPEK	FOKUS	N O	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						anggaran Rp10.979.075.000,00 realisasi Rp10.598.192.000,00 8. Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan anggaran Rp80.216.041.978,00 realisasi Rp69.971.928.950,00 9. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliha ran drainase/gorong gorong anggaran Rp10.455.152.200,00 realisasi Rp10.074.801.000,00 10. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliha ran infrastruktur pedesaan anggaran Rp31.965.071.200,00 realisasi Rp27.944.122.099,00			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						11. Program pengembangan jasa konstruksi anggaran Rp1.109.496.000,00 realisasi Rp854.189.500,00			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 5 SOP: 1. SOP Pengesahan Dokumen Perencanaan 2. SOP Pelayanan Aduan Gangguan sambungan rumah 3. SOP Pelayanan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang milik jalan 4. SOP Pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa 5. SOP Survey dan Identifikasi Penelitian Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	Ada, sebanyak 6 SOP : 1. SOP Pelayanan site plan/rencana tapak 2. SOP Pelayanan permohonan sambungan rumah (sanitasi) 3. SOP pelayanan permohonan penghuni rusunawa 4. SOP Pelayanan Pembayaran Retribusi Rusunawa 5. SOP Pelayanan Pengunudran Diri Penghuni Rusunawa 6. SOP Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja	Ada 5 SOP	Ada 7 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	ada	ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Penyelenggaraa n Urusan		Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 22 - Jabatan yang ada, sebanyak 26	- Jabatan yang terisi sebanyak 6 - Jabatan yang ada, sebanyak 6	84,61 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional - arsiparis - pranata komputer	Tidak ada	Ada 2 jabatan	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 102 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 10 personil	1,27 %	0,12 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		an tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait			PNS Kabupaten	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011personil	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 4 org - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.	68,18 %	66,66%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt.	100 %	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah					
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 14 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					RKA Perangkat Daerah x 100%				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp205.196.612.158,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp3.011.703.422,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	8,19 %	0,12 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp185.384.267.959,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.772.294.045,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	8,12 %	0,12 %

N O	ASPEK	FOKUS	N O	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp178.358.395.270,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp185.384.267.959,00	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.772.294.045,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.772.294.045,00	96,21 %	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp7.025.872.689,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 185.384.267.959,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.772.294.045,00	3,79 %	0 %
		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PU	Urusan PKP	Urusan PU	Urusan PKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jml asset yg tdk digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp2.334.140.381.025,76	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp318.574.520.725,82	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman berita 2. Papan pengumuman lelang lpse.bantulkab.go.id 3. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui website www.bantulkab.go.id 4. Leaflet 5. Brosur 6. Website, Email	Jenisnya 1. Papan pengumuman berita 2. Papan pengumuman lelang lpse.bantulkab.go.id 3. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui website www.bantulkab.go.id 7. Leaflet 8. Brosur 6. Website, Email	Jumlah sbyk 6 jenis.	Jumlah sbyk 6 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : Bantul

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Tata Ruang
- Urusan Pertanahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Perencanaan Tata Ruang Anggaran : Rp987.150.000,00 Realisasi : Rp976.171.500,00 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Anggaran Rp1.187.005.000,00 Realisasi Rp1.039.630.500,00	1. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Anggaran Rp162.015.000,00 Realisasi Rp135.521.480,00 2. Program Penyelesaian konflik-Konflik Pertanahan Anggaran Rp31.325.000,00 Realisasi Rp31.325.000,00	2 Program	2 program
		Kesesuaian dengan kebijakan	2	Keberadaan Standard	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 4 yang terdiri dari:	Ada, Sebanyak 4 yang terdiri dari:	Ada 4 SOP	Ada 4 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND		Operating Procedure (SOP)		<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengajuan rekomendasi aspek tata ruang 2. SOP pengajuan rekomendasi keterangan rencana kabupaten 3. SOP penyusunan raperda tata ruang 4. SOP pengajuan persetujuan prinsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengadaan tanah untuk kepentingan umum/daerah yang berasal dari tanah kas desa 2. SOP pengadaaan tanah untuk kepentingan umum/daerah yang berasal dari hak milik penduduk 3. SOP fasilitasi penyelesaian kondlik-konflik pertanahan 4. SOP pemanfaatan tanah kas desa 		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	<p>Ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 	<p>Ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						<p>Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY 2009-2029</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul 2010-2030</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY 2009-2029</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul 2010-2030</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung</p> <p>6. Peraturan Daerah</p>		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang	Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 5 - Jabatan yang ada, sebanyak 5	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 11	100 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 13 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 29 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,16 %	0,36 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada,	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 7 org - Pejabat yang ada,	40 %	63,64 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				pelatihan kepemimpinan	kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	sebanyak 5 org.	sebanyak 11 org.		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.	100 %	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Daerah					
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	100 %	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah,	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah,	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				dalam DPA Perangkat Daerah	dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak 2 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	sebanyak 5 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.174.155.000,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp5.338.021.264,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	0,09 %	0,21 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.015.802.000,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp4.933.001.875,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,09 %	0,22 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.015.802.000,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.191.353.139,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar	100 %	44,42 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Rp2.015.802.000,00	Rp4.933.001.875,00		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp2.015.802.000,00	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.741.648.736,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp4.933.001.875,00	0 %	55,58 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah,	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah,	0 %	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan	Urusan Tata Ruang	Urusan Pertanahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	sebanyak Rp893.245.055,00	sebanyak Rp4.234.237.522,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebut jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Subdomain / website 3. Meja informasi 4. Leaflet produk layanan 5. Informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa (sirup.lkpp.go.id)	Sebut jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Subdomain / website 3. Meja informasi 4. Leaflet produk layanan 5. Informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa (sirup.lkpp.go.id)	Jumlah sebanyak 5 jenis	Jumlah sebanyak 5 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada survey Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Ada survey Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM (bergabung dengan urusan tata ruang)	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : Bantul

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Satuan Polisi Pamong Praja

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Anggaran: Rp644.431.000,00 Realisasi: Rp641.350.000,00 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal Anggaran: Rp701.080.000,00 Realisasi: Rp701.030.000,00 3. Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Anggaran: Rp563.262.000,00 Realisasi: Rp562.435.000,00 4. Program Penegakan Perda Anggaran: Rp513.014.000,00 Realisasi: Rp510.317.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 15 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Piket Perkantoran, Rumah Dinas Bupati, dan Rumah Dinas Wakil Bupati 2. SOP ttg Piket Perkantoran Komplek Parasamya	15 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. SOP ttg Piket Jaga Gedung Induk 4. SOP ttg Mekanisme Anggaran Perubahan Sat Pol PP 5. SOP ttg Operasi Non Yustisi 6. SOP ttg Operasi Yustisi 7. SOP ttg Pelatihan dan Pembinaan Linmas 8. SOP ttg Piket Posko Siaga Linmas 9. SOP ttg Penugasan Anggota Linmas 10. SOP ttg Penugasan Anggota Sat Pol PP 11. SOP ttg Pengamanan Upacara dan Acara Penting 12. SOP ttg Pelayanan Pengaduan 13. SOP ttg Operasi Penertiban Paksa 14. SOP ttg Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 15. SOP ttg Tindak Lanjut LHP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 13	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 49 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,61 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	53,85 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp9.471.105.174,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,38 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp9.330.790.542,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,41 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp6.115.210.997,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp9.330.790.542,00 	65,54 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.215.539.545,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp9.330.790.542,00 	34,46 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 5.948.533.300,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan ada 6 jenis 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil patroli 5. Website Resmi 6. Media Sosial: Instagram, Twitter, Facebook	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah ada 6 Program : 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam – anggaran Rp3.332.096.000,00 – realisasi Rp3.156.213.700,00 2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran – anggaran Rp708.590.000,00 – realisasi Rp686.580.500,00 3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana – anggaran Rp66.770.728.510,00 – realisasi Rp8.289.173.895,00	3 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 6 yang terdiri dari: 1. SOP Pemasangan Papan Informasi Bencana 2. SOP Pendirian dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	6 Jumlah

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. SOP Sistem Komando dan Penanganan Bencana 4. SOP Penanganann Pengungsi 5. SOP Pengelolaan Logistik dan Peralatan Bencana 6. SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 10 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Peraturan Daerah Tahun 2015 Nomor 14 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Tentang Kesiapsiagaan Dan Peringatan	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Tentang Penanggulangan Bencana	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan yang ada sebanyak 14 -Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional tidak ada	tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,39 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 3 org - Pejabat yang ada sebanyak 14 Org	21,43 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp82.902.000.447,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	3,31 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp23.104.857.099,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	1,01 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp21.085.829.394 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp23.104.857.099,-	91,26 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.019.027.705,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp23.104.857.099,-	8,74%
			Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.16.325.292.664,23	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Publikasi di Media Luar Ruang (Jalur Evakuasi, Leaflet, Spanduk, Banner) 3. Publikasi di Website 4. Publikasi di Mass Media (Televisi dan Radio) 5. Publikasi Media Sosial (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram)	Jumlah sbyk 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, 82,32

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Sosial
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial; Anggaran: Rp1,153,669,900,00 Realisasi: Rp1,144,835,900,00 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Anggaran: Rp8,491,075,000,00 Realisasi: Rp8,351,093,100 3. Program	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Anggaran: Rp195,314,990,00 Realisasi: Rp192,769,590,00 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Anggaran: Rp457,099,000,00 Realisasi:	4 Program	3Program

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Anggaran: Rp1,167,648,400,00 Realisasi: Rp1,154,855,400,00 4. Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial; Anggaran: Rp1,181,402,415,00 Realisasi: Rp1,178,142,830	Rp452,710,900,00 3. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Anggaran: Rp291,914,100,00 Realisasi: Rp288,591,000,00		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 25 SOP pelayanan bidang sosial, yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Jaminan Sosial 2. SOP ttg Pengolahan Data 3. SOP ttg Penyusunan SK Bupati Pelaksanaan MPM 2017 4. SOP ttg Penyusunan Data Jamkesda 5. SOP ttg Penyusunan Data Jamkesta	Ada 24 SOP pelayanan bidang PPPA, yang terdiri dari: 1. SOP ttg UPTD perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 2. SOP ttg Pelayanan pengaduan 3. SOP ttg Pelayanan konsultasi psikologi 4. SOP ttg Pelayanan Shelter 5. SOP ttg Pelayanan Reintegrasi Sosial	ada	ada

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						6. SOP ttg Alur Penyusunan Data PBI APBD 7. SOP ttg Alur Penyusunan Data PBI JKN 8. Sop ttg Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah 9. SOP ttg Pelaksanaan Tugas Lain dari Kepala Dinas 10.SOP ttg Penanganan Jenazah Terlantar 11.SOP ttg Pelayanan Rujukan bagi PMKS 12.SOP ttg Pelayanan Lansia Terlantar 13.SOP ttg Pelayanan Adopsi Anak 14.SOP Pelayanan Penca Berat 15.SOP ttg Distribusi Raksin 16.SOP tentang Rekomendasi KUBE 17.SOP ttg Pelayanan Korban Bencana	6. SOP ttg Eksternal Pidana 7. SOP ttg Eksternal Perdata 8. SOP Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan TPPPO 9. SOP Pelatihan Anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan 10.SOP Pelatihan Guru BK SMP & SMA 11.SOP Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 12.SOP Pelatihan Fonaba 13.SOP Pelaporan Data Gender dan Anak 14.SOP Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengarustamaan Gender (KIE PUG)		

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						18.SOP ttg Verifikasi Komitmen dan Pembayaran Bantuan PKH 19.SOP ttg Penanganan Orang Terlantar (Kehabisan Bekal Perjalanan) 20.SOP ttg Pelayanan Administrasi Ijin Operasional Orsos 21.SOP ttg Penyaluran 22.Bansos dan Hibah 23.SOP Penanganan Keluhan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu(SLRT) 24.Kunjungan Ziarah TMP 25.Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	15.SOP Docal Poit Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender 16.SOP Sosialisasi PUG 17.SOP Perencanaan dan Penganggaran yang respponsif gender 18.SOP Pemakaian Mobil Perlindungan 19.SOP Pelayanan Pengaduan 20.SOP Analis Kebutuhan Korban 21.SOP Persetujuan Korban 22.SOP Managemen Kasus 23.SOP Rujukan ke Lembaga Layanan 24.SOP Pelayanan Pemantauan		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraa	Ada atau tidak perda	- PERDA Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten nomor 12 tahun 2016 tentang	- PERDA Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten nomor 12 tahun 2016 tentang	Ada	Ada

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				n Urusan		pembentukan dan susunan perangkat daerah	pembentukan dan susunan perangkat daerah		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi 13 - Jabatan yang ada, 14	- Jabatan yang terisi 5 - Jabatan yang ada, 5	92,86 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 7 Personil. - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.018 personil	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 29 Personil. - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.018 personil	0,09 %	0,36 %
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklatpim dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 - Pejabat yang ada, sebanyak 13	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 4 - Pejabat yang ada, sebanyak 5	61,54 %	80 %

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 - Pejabat yang ada, sebanyak 13	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 - Pejabat yang ada, sebanyak 5	100 %	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA Perangkat Daerah 2.RENJA Perangkat Daerah 3.RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA Perangkat Daerah 2.RENJA Perangkat Daerah 3.RKA Perangkat Daerah	Ada 3 jenis dokumen	Ada 3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %	100 %

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					pada RPJMD x 100%				
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp18.686.784.273,00 - Total belanja APBD sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp944.328.090,00 - Total belanja APBD sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,75 %	0,04

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp18.371.934.829,20 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp934.071.490,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,80 %	0,04 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp15.860.213.619,20 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp18.371.934.829,20 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp934.071.490,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp934.071.490,00 	86,33 %	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.511.721.210,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp18.371.934.829,20 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp934.071.490,00 	13,67 %	0 %

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca. 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca. 2. CALK. 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	17	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. Buku Inventaris	Ada, Jenis dokumennya. Buku Inventaris	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	18	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp8.159.175.301,49	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp8.159.175.301,49	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	19	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenis fasilitas sarpras : 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di mass media 4. Mobil rescue 5. Motor trail/rescue 6. Truk dapur umum 7. Truk pengangkut bantuan bencana 8. Mobil PMKS	Jenis fasilitas sarpras : 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Website 4. Mobil PPPA 5. Hot line 24 jam	8 Jenis	5 Jenis

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Sosial	PPPA	Sosial	PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	20	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey kepuasan tentang: Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan di Dinas Sosial, dengan angka indeks kepuasan sebesar 85 %	Survey kepuasan tentang: Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan di Dinas Sosial, dengan angka indeks kepuasan sebesar 85 %	IKM Unit Pelayanan : 90,6	IKM Unit Pelayanan : 90,6

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : Bantul

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Tenaga Kerja
- Urusan Transmigrasi

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Anggaran: Rp1.676.421.000,00 Realisasi: Rp1.615.469.600,00 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Anggaran: Rp576.805.000,00 Realisasi: Rp556.472.900,00 3. Program Perlindungan	1. Program Transmigrasi Rehional Anggaran: Rp445.426.500,00 Realisasi: Rp419.027.650,00	5 Program	1 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Anggaran: Rp886.559.500,00 Realisasi: Rp868.949.800,00 4. Program Penempatan Tenaga Kerja Anggaran: Rp511.620.000,00 Realisasi: Rp482.102.360,00 5. Program Perluasan Kerja Anggaran: Rp22.748.005.000,00 Realisasi: Rp22.050.583.596,00			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada,sebanyak 12 SOP yang terdiri dari: 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Pelatihan Non Konstitusional 2. Standar Operasional	Ada,sebanyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Pendaftaran, Seleksi dan Pemandahan Transmigrasi	13 SOP	2 SOP

N O	ASPEK	FOKUS	N O	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Kerja 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Pelatihan Institusional 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelayanan Pendaftar Pencari Kerja dan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja (Pencarian AKI) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Baku Pengoperasian Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Penyuluhan dan Motivasi Masyarakat		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Baku Pengoperasian Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tiap Tahun 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Baku Pengoperasian Penyelesaian Perseisihan Hubungan Industrial (PHI)melalui Mediasi 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Permohonan Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Outsourcing di Disnakertrans Kab Bantul 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pengesahan Peraturan			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Perusahaan (PP) 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 12. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Penyelenggaraan Urusan		Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan	Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 17 jabatan - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 jabatan - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jabatan	94 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 3 1. Pengantar kerja 2. Perantara Hubungan Industrial / Mediasi 3. Instruktur Pelatihan	Tidak ada	Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 56 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yg menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 3 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,70 %	0,03 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yg telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jml total	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 1 org - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	88,24 %	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					pejabat perangkat daerah yg ada x 100%				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yg mengikuti kepangkatan dibagi jml total pejabat Perangkat Daerah yg ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	100 %	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra Perangkat Daerah 2.Renja Perangkat Daerah 3.RKA Perangkat Daerah	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra Perangkat Daerah 2.Renja Perangkat Daerah 3.RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Daerah					
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 	100 %	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program. 	100 %	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp33.858.707.940,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp445.426.500,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	1,35 %	0,02 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp32.503.098.397,50 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp419.027.650,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	1,42 %	0,02 %

N O	ASPEK	FOKUS	N O	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp28.585.091.292,50 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp32.503.098.397,50	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.419.027.650,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp419.027.650,00	87,95 %	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.918.007.105,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp32.503.098.397,50	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp419.027.650,00	12,05 %	0 %.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.6.971.994.692,-	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.1.527.837.000,-	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman mass Media	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Kotak pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman mass media	Jumlah sbyk 5 jenis.	Jumlah sbyk 5 jenis
		Responsivitas terhadap	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada

N O	ASPEK	FOKUS	N O	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Trans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		partisipasi masyarakat			Masyarakat terhadap Pelayanan publik				

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL
NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Pangan
- Pertanian
- Kelautan dan Perikanan (KP)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, Anggaran: Rp756.230.000,00 Realisasi Rp751.784.000,00	1. Program Peningkatan Produksi Perikanan, Anggaran: Rp2.639.667.600,00 Realisasi: Rp2.586.496.908,07	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Anggaran Rp4.489.743.300,00 Realisasi Rp4.209.343.718,00 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan, Anggaran:	1 Program	1 program	6 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								Rp571.085.000,00 Realisasi: Rp570.140.000,00 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Anggaran: Rp966.584.761,00 Realisasi: Rp943.863.134,00 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Anggaran: Rp910.100.000,00 Realisasi: Rp877.293.975,00 5. Program Peningkatan , Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Anggaran: Rp355.343.750,00 Realisasi: Rp331.952.450,00 6. Program Peningkatan			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								Sarana dan Prasaran Pertanian, Anggaran Rp20.910.839.548,00 Realisasi Rp6.789.413.345,00			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada,sebanyak 15 SOP: 1. SOP Analisa NBM 2. SOP Penanganan Daerah Rawan Pangan 3. SOP Pembinaan Desa Mandiri Pangan 4. SOP Pelatihan dan Workshop 5. SOP Perlombaan di Bidang Ketahanan Pangan 6. SOP Pemantauan harga pangan	Ada sebanyak 18 SOP: 1. SOP Penggunaan OIKB 2. SOP Pengelolaan penggunaan sapras 3. SOP Pengawasan Pembudidayaan dan pembenihan ikan 4. SOP Kebijakan Mutu Benih/ Induk Ikan 5. SOP CBIB 6. SOP Pengajuan Proposal	Ada sebanyak 56 SOP: 1. SOP Pengendalian Alih 2. Fungsi Lahan 3. SOP Updating PLP2B 4. SOP Pengawasan Pupuk Bersubsidi 5. SOP Alokasi Pupuk Bersubsidi 6. SOP Pengajuan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 7. SOP Pendayagunaan	Ada 15 SOP	Ada 18 SOP	Ada 56 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						7. SOP Pemantauan stok pangan 8. SOP Penyaluran cadangan pangan pemerintah 9. SOP Monev P2KP 10.SOP Analisa PPH 11.SOP Optimalisasi KRPL 12.SOP Sertifikasi Mutu 13.SOP Sosialisasi Keamanan Pangan 14.SOP Monev Kelompok Pengelola Keg. Bidang ketapang 15.SOP Pembinaan dan Pemberdayaan	7. SOP Analisis Laboratorium 8. SOP Hibah/Bantuan dari APBN dan APBD DIY 9. SOP Persiapan Kolam 10.SOP Pemeliharaan dan Perawatan Induk 11.SOP Seleksi Induk Matang Gonad 12.SOP Persiapan Kolam Pemijahan 13.SOP Persiapan Bak Pemeliharaan Larva 14.SOP Pemijahan 15.SOP Penetasan Telur di Kolam Pemijahan 16.SOP Penetasan Telur di Bak	n Alat Mesin Pertanian 8. SOP Asuransi Usaha Tani 9. SOP Pendampingan PUAP 10.SOP Pengajuan Proposal Bantuan Alat Mesin Pertanian 11.SOP Pengajuan Proposal Bantuan Prasarana Sarana Pertanian 12.SOP Bimtek Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 13.SOP Sekolah Lapang TAJARWO Padi 14.SOP Sosialisasi			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						Kelompok Pengelola Kegiatan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	Pemeliharaan Larva 17.SOP Pendederan Benih Ikan Lele 18.SOP Panen dan Pengemasan Benih	15.SOP Workshop 16.SOP Lomba Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 17.SOP Uji Fisik Daging di Laboratorium 18.SOP Uji Pemeriksaan Air Susu di Laboratorium 19.SOP Pengambilan Sampel Pangan Asal Hewan (PAH) 20.SOP Penerbitan SIP (Surat Ijin Praktik) 21.SOP Penerbitan SKKH 22.SOP Pengawasan			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								Kesehatan Hewan Di Pasar Hewan 23.SOP Sosialisasi Penyakit Hewan Menular 24.SOP Vaksinasi Unggas 25.SOP Pengambilan Sampel Daging (Sapi/ Kambing / Ayam) 26.SOP Pengambilan Sampel Susu 27.SOP Pendaftaran Calon Petani Penangkar 28.SOP Pembelian GKP Calon Benih 29.SOP Pasca Panen 30.SOP Pembersihan Benih			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								31.SOP Pengemasan Benih 32.SOP Penjualan 33.SOP Sertifikasi Benih 34.SOP Pelayanan Informasi Perbenihan 35.SOP Pembuatan Benih Padi 36.SOP Pengangkutan GKP Calon Benih 37.SOP Siperkasa 38.SOP Pelayanan Hewan Aktif 39.SOP Pelayanan Hewan Semi Aktif 40.SOP Pelayanan Hewan Pasif 41.SOP Penyembelihan Hewan UPT RPH 2019			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								42.SOP Penarikan Retribusi UPT RPH 43.SOP Penerimaan Bahan Baku Kotoran Ayam, Kotoran Sapi dan Kapur 44.SOP Penerimaan Bahan Baku Batubara, Mixtro dan Karung 45.SOP Perjanjian Jual Beli Pupuk Petroganik 46.SOP Pengujian Laboratorium Bahan Baku Kotoran Ayam, Kotoran Sapi dan Kapur 47.SOP Membuat Granul 48.SOP Pengeringan Pupuk Organik			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								49.SOP Pengayakan 50.SOP Pengepakan 51.SOP Pengujian Laboratorium Pupuk Petroganik Granul 52.SOP Penyimpanan ke Gudang Soge 53.SOP Pengiriman Pupuk Petroganik ke Gudang Penyangga 54.SOP Pencairan Penjualan Pupuk Petroganik 55.SOP Penerbitan SKKH 56.SOP Penyebarluasa n Informasi			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
								56.SOPPengaduan			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 6 - Jabatan yang ada, sebanyak 6	- Jabatan yang terisi sebanyak 24 - Jabatan yang ada, sebanyak 24	100 %	100 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Analisis Ketahanan Pangan	Tidak ada	Ada, Medik veteriner, Paramedik veteriner, Penyuluh pertanian	Ada, 1 jabatan	Tidak Ada	Ada, 3 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah	- PNS yang menangani urusan (1)	- PNS yang menangani urusan (2)	- PNS yang menangani urusan (3)	0,10 %	0,22 %	1,97 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait			terhadap Total PNS Kabupaten	Perangkat Daerah , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	Perangkat Daerah , sebanyak 17 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	Perangkat Daerah , sebanyak 158 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil			
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	- Pejabat telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.	- Pejabat telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak 22 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.	75 %	100 %	91,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 24 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yg ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 9	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	100 %	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 9 program.	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp756.230.000,00	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.639.667.600,00	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp45.610.624.437,00	0,03 %	0,11 %	1,82%
						Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45			
						Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp751.784.000,00	Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.586.496.908,07	Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp29.602.632.687,28			
			14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,03 %	0,11 %	1,82 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp751.784.000,00	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.586.496.908,07	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp17.127.009.053,28	100 %	100 %	57,86 %
						Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp751.784.000,00	Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.586.496.908,07	Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp29.602.632.687,28			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp751.784.000,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp751.784.000,00	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.586.496.908,07	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp12.475.623.634,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp29.602.632.687,28	0 %	0 %	42,14 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada	Ada
		Penggunaan Asset	19	Jumlah yang tidak digunakan	Jumlah asset yang tidak digunakan	Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.	Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.	Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.	0 %	0 %	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Perangkat Daerah		oleh Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebanyak Rp10.144.305.475,-	Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebanyak Rp32.017.531.425,-	Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebanyak Rp43.497.999.427,-			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya: 1. Papan pengumuman berita 2. Papan pengumuman lelang (Ipse.bantulkab.go.id) 3. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui website www.diperpau.tkan.bantulkab.go.id 4. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui radio 5. Penyampaian informasi pada	Jenisnya: 1. Papan pengumuman berita 2. Papan pengumuman lelang (Ipse.bantulkab.go.id) 3. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui website www.diperpau.tkan.bantulkab.go.id 4. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui radio 5. Penyampaian informasi pada	Jenisnya: 1. Papan pengumuman berita 2. Papan pengumuman lelang (Ipse.bantulkab.go.id) 3. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui website www.diperpau.tkan.bantulkab.go.id 4. Penyampaian informasi pada masyarakat melalui radio 5. Penyampaian informasi pada	Jumlah sbyk 13 jenis.	Jumlah sbyk 13 jenis	Jumlah sbyk 13 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Pangan	Urusan (KP)	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan KP	Urusan Ptanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						masyarakat melalui Televisi 6. Leaflet 7. Buletin Suluh Pangan 8. Memfasilitasi pelaku usaha dalam Bantul Expo dan Pasar Tani 9. Mobil ATI (P2HP) 10.Meja Resepsionis 11.Kotak Saran 12.Layar Informasi 13.Sosial media - FB - Twitter - Instagram - Youtube	masyarakat melalui Televisi 6. Leaflet 7. Buletin Suluh Pangan 8. Memfasilitasi pelaku usaha dalam Bantul Expo dan Pasar Tani 9. Mobil ATI (P2HP) 10.Meja Resepsionis 11.Kotak Saran 12.Layar Informasi 13.Sosial media - FB - Twitter - Instagram - Youtube	masyarakat melalui Televisi 6. Leaflet 7. Buletin Suluh Pangan 8. Memfasilitasi pelaku usaha dalam Bantul Expo dan Pasar Tani 9. Mobil ATI (P2HP) 10.Meja Resepsionis 11.Kotak Saran 12.Layar Informasi 13.Sosial media - FB - Twitter - Instagram - Youtube			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : Bantul

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Lingkungan Hidup

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 program : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan – Anggaran Rp8.374.915.000,00 – Realisasi Rp7.772.131.633,01 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Anggaran Rp7.802.679.000,00 – realisasi Rp7.381.824.562,80 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam – Anggaran Rp5.912.702.000,00 – realisasi Rp5.696.103.561,93 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup – Anggaran 1.046.285.000,00 – realisasi Rp 1.025.195.500,00	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Ada, sebutkan ada banyak 42 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Pengendalian Pencemaran (5 SOP) 2. SOP ttg Pengendalian Kerusakan dan Konservasi (6 SOP) 3. SOP ttg Laboratorium Lingkungan (15 SOP) 4. SOP ttg Persampahan (13 SOP) 5. SOP ttg Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/PPLH (3 SOP) 	Ada 42 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	<p>Ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Perda 12 th 2015 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Perda 7 th 2018 ttg perubahan perda no 14 th 2000 ttg pengendalian 	Ada 3 Perda

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pencemaran air 5. Perda 2 th 2019 ttg pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 20 - Jabatan yang ada, sebanyak 20	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	jabatan fungsional, Ada 2 Yaitu : 1. Pranata Komputer Terampil 2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Ada 2 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 113 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	14,11 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	90 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp39.290.150.981,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	1,57 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp37.641.398.965,74 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	1,65 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp31.239.041.482,74 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp37.641.398.965,74	82,99 %
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp6.402.357.483,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp37.641.398.965,74	17,01 %	
	Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.61.327.095.005,95	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Baliho 7. Running Teks 8. Iklan Layanan Masyarakat 9. Talk Show di Radio 10. Instagram, Twiter, Facebook, Web	Jumlah sbyk 10 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Adm.Kependudukan dan Catatan Sipil

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 3 program teknis : 1. Penataan Administrasi Kependudukan – Anggaran Rp3.341.909.500,00 – Realisasi Rp3.289.983.154,00 2. Keserasian Kebijakan Kependudukan – Anggaran Rp1.116.564.300,00 – Realisasi Rp1.110.443.000,00 3. Pengelolaan Data Kependudukan – Anggaran Rp671.173.760,00 – Realisasi Rp670.548.750,00	3 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada 28 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Batal Pindah 2. SOP ttg KIA Baru,Hilang,Rusak- 3. SOP ttg KTP-EL Baru 4. SOP ttg Penerbitan Akta Kelahiran 5. SOP ttg Penerbitan Akta Kematian	Ada 28 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6. SOP ttg Penerbitan KK Baru 7. SOP Penerbitan SKTT dan KTP OA 8. SOP ttg Pindah datang Langsung ke Dinas 9. SOP ttg Pelayanan Data dan Informasi Adminduk 10. SOP ttg Pemanfaatan Data 11. SOP ttg Pemberian Hak Akses SIAK 12. SOP ttg penerbitan Akta Pengakuan Anak 13. SOP ttg Penerbitan Akta Pengangkatan Anak 14. SOP ttg Penerbitan Akta Perceraian 15. SOP ttg Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran 16. SOP ttg Penerbitan Akta Perceraian 17. SOP ttg Percepatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran 18. SOP ttg Percepatan Pelayanan Pencatatan Kematian 19. SOP Perubahan Kewargamegaraan 20. SOP ttg PKS Pemanfaatan NIK Data Kependudukan 21. SOP ttg Pelayanan Informasi Online 22. SOP ttg Penanganan Keberatan 23. SOP ttg Penanganan Sengketa Informasi 24. SOP ttg Pengklasifikasian Informasi 25. SOP Publikasi Adminduk 26. SOP ttg Penerbitan Akta Perkawinan	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						27. SOP ttg Pelayanan Informasi 28.SOP ttg Penyusunan Laporan Informasi Publik	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2. Perda no 16 tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang ada, sebanyak 16	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada ,1 Arsiparis Mahir	Ada 1 jabatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 54 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,67 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	87,5 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp13.283.048.790,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	0,53 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp13.034.655.417,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,57 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp9.655.279.547,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp13.034.655.417,00	74,07 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.379.375.870,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp13.034.655.417,00	25,93 %
	Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 11.088.179.604,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada, 10 jenis, antara lain: 1. Sosialisasi dan Penyuluhan) Penataan Administrasi Kependudukan 15 kali di Ketua RT di Piyungan , Dlingo Sewon , Jetis ,Banguntapan dan Kretek Kecamatan ttng arti pentingnya administrasi kependudukan 2. Siaran interaksi di Bantul Radio 3. www.bantulkab.go.id , (Facebook; disdukcapil bantul, IG; disdukcapilbantul) 4. Talk Show 18 kali 5. Papan Pengumuman 6. Kotak Saran/Pengaduan 7. Leaflet 8. Banner 9. Spanduk 10.Pelayanan Mobile keliling jemput Bola	Jumlah sbyk 10 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Keluarga Berencana Pagu : Rp6.402.225.600,00 Realisasi Rp.6.361.520.813,00 2. Program pelayanan kontrasepsi Pagu : Rp115.900.000,00 Realisasi: Rp.85.892.250,00 3. Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan Pagu: Rp249.483.400,00	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan pagu: Rp670.315.000,00 realisasi: Rp670.115.000,00 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa pagu: Rp1.695.233.100,00 realisasi: Rp1.695.058.100,00 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	7 Program	5 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Realisasi: Rp249.483.400,00 4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pagu: Rp170.650.000,00 Realisasi: Rp169.400.000,00 5. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pagu: Rp75.365.000,00 Realisasi: Rp75.365.000,00 6. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pagu: Rp317.275.000,00 Realisasi: Rp316.422.000,00 7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pagu: Rp27.500.000,00 realisasi:	Pedesaan Pagu: Rp853.862.000,00 Realisasi: Rp851.529.000,00 4. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Pagu: Rp146.780.000,00 realisasi Rp146.780.000,00 5. Program Pemberdayaan Masyarakat pagu: Rp5.705.684.200,00 realisasi: Rp5.645.949.600,00		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Rp27.500.000,00			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Ada, sebanyak 7 SOP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah 2. SOP sosialisasi advokasi program KKBPK 3. SOP monev pengelolaan dana bergulir 4. SOP evaluasi kegiatan tribina BKB, BKR, BKL dan Posdaya 5. SOP pengolahan data statistik daerah 6. SOP pembentukan dan pencaangan kampung KB 7. SOP monev TNI mangunggal KB kesehatan 	<p>Ada, sebanyak 5 SOP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP TMMMD 2. SOP. Evaluasi PPWKSS 3. SOP. Lomba Desa 4. SOP pemberian penerimaan PMT bagi lembaga baru 5. SOP Bintek pengembangan potensi desa ekonomi pedesaan dan teknologi tepat guna 	Ada 7 SOP	Ada 5 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER	Peraturan yang berkaitan dengan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada)	Ada atau tidak ada	<p>Ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan 	<p>Ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan 	ada	ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
	UNDANG-UNDANGAN	Penyelenggaraan Urusan		yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan		Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 13	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam	Ada, Jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil	Tidak ada	Ada 1 jabatan	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				struktur organisasi Perangkat Daerah	struktur organisasi Perangkat Daerah				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 29 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 14 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,36 %	0,17 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	76,92 %	75 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					x 100%				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPД	10	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPД yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	- Program RKPД yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 5 program.	100 %	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp14.972.880.821,00 - Total Belanja APBD, sebesar	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp9.071.874.300,00 - Total Belanja APBD, sebesar	0,60 %	0,04 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Rp2.504.062.661.991,45	Rp2.504.062.661.991,45		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar Rp14.563.404.687,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	- Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar Rp9.009.431.700,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0,64 %	4,05 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- realisasi belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp11.505.422.392,00 - Total realisasi Belanja perangkat daerah sebesar Rp.23.572.836.387,-	- realisasi belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp9.009.431.700,00 - Total realisasi Belanja perangkat daerah sebesar Rp9.009.431.700,00	79,00 %	38,21 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah sebesar Rp3.057.982.295,00 - Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.24.044.755.121,-	- Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah sebesar Rp0,00 - Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp9.009.431.700,00	21,00 %	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan keuangan	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	1. Neraca 2. CALK 3. LRA	1. Neraca 2. CALK 3. LRA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.14.885.348.831,-	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.2.073.431.728,-	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet. 3. Mobil Keliling 4. Website. 5. Siaran Radio 6. Mobil pelayanan 7. Facebook	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet. 3. Mobil Keliling 4. Website. 5. Siaran Radio 6. Mobil pelayanan 7. Facebook	Jumlah sbyk 9 jenis.	Jumlah sbyk 9 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan PPKB	Urusan PMD	Urusan PPKB	Urusan PMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				10. Mass Media		8. Instagram 9. Youtube	8. Instagram 9. Youtube		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Perhubungan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Perhubungan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Anggaran Rp. 2,392,821,500.00 - Realisasi Rp. 2,347,670,975.00 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Anggaran Rp. 803,276,000.00 - Realisasi Rp. 797,513,360.00 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Anggaran Rp. 164,075,000.00 - Realisasi Rp. 162,996,000.00 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Anggaran Rp. 20,922,174,800.00,- - Realisasi Rp. 19,894,393,496.30,- 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Anggaran Rp. 1,152,795,000.00,-	6 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Rp. 1,139,635,500.00 6. Program Pengembangan Kelalu-Lintasan <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp. 4,680,991,000.00 - Realisasi Rp. 4,595,417,140.00 	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 18 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemberian Surat Ket. Bongkar Muat Barang 2. SOP Pemberian Rekomendasi Penerbitan TNKB Warna Dasar Kuning Tulisan Hitam Untuk Angkutan Barang 3. SOP Pemberian Ijin Insidentil 4. SOP Pemberian Rekomendasi Penerbitan TNKB Warna Dasar Kuning Tulisan Hitam Untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. SOP Pemberian Rekomendasi Angkutan Umum AKDP 6. SOP Penerbitan Daftar Ulang Kartu Pengawasan Angkutan Perbatasan dan Pedesaan 7. SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian LL Kawasan Penataan Obyek Wisata Parangtritis 8. SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana LLAJ 9. SOP Pelaksanaan Pengamanan LL 10. SOP Pelaksanaan Penyidikan di Bidang 	Ada 18 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						LLAJ 11.SOP Penerbitan Ijin Parkir Khusus 12.SOP Penerbitan Ijin Parkir di .. Program Tepi Jalan Umum 13.SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama 14.SOP Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor 15.SOP Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan/ Penghapusan Kendaraan 16.SOP Pengaduan Masyarakat/Banding 17.SOP Pelayanan Numpang Uji/Mutasi Keluar Daerah 18.SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 13 jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 13 jabatan 	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional Ada 2 yaitu : 1. Pelaksana Lanjutan 2. Pelaksana	Ada 2 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 55 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil 	0.69%
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 	84,62 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPД	10	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPД yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp38.644.314.387,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	1,54%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp37.054.326.818,30 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	1,62 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp33.702.583.512,30 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp37.054.326.818,30 	90,95 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.351.743.306,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp37.054.326.818,30 	9,05 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp132,732,157,498,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Stiker 3. SMS Center 4. Media Elektronik 5. Mobil keliling	Jumlah sbyk 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL
NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Komunikasi dan Informatika

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Komunikasi dan Informatika(Kominfo)
- Statistik
- Persandian

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Anggaran Rp15.179.080.000,00 Realisasi Rp14.538.090.142,09 2.Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Anggaran	1.Program Penelitian dan Pengembangan bidang informasi dan komunikasi Anggaran Rp367.715.000,00 Realisasi Rp355.743.400,00	1.Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian Anggaran Rp805.233.577,00 Realisasi Rp777.812.184,00	4 Program	1 Program	1 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						Rp512.800.000,00 Realisasi: Rp504.489.500,00 3. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Anggaran Rp60.620.000,00 Realisasi Rp53.270.000,00 4. Program kerjasama informasi dengan mas media Anggaran Rp1.946.435.000,00 Realisasi Rp1.914.325.350,00					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. Ada sebanyak 15 yang terdiri dari: 2. SOP tentang pelayanan informasi Publik 3. SOP Permohonan	Tidak ada	Ada, Sebanyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Penyelenggaraa n Kegiatan Keamanan Informasi	Ada 15 SOP	Tidak ada	Ada2 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						informasi Publik 4. SOP Pelayanan Permohonan Infromasi Publik 5. SOP Pengumpulan data dan Informasi 6. SOP Pengembangan Aplikasi system Informasi 7. SOP Pengelolaan Aplikasi Sitem Informasi 8. SOP Audit Aplikasi Sistem Telematika 9. SOP Pemberdayaan Sistem Telematika 10.SOP Penanganan Pengaduan Infrastruktur Jaringan		2. SOP Penanganan Pengaduan Telekomunikasi			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						Internet dan Intranet 11.SOP ttgPermohonan penambahan jaringan Internet dan Intranet 12.SOP ttg Perbaikan Infrastruktur jaringan Internet dan Intranet 13.SOP ttg pembuatan Infrastruktur jaringan Internet dan Intranet baru 14.SOP Penyelenggaraa n Kegiatan Infrastruktur & Tekologi 15.SOP tentang pelayanan retribusi					

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						menara 16.SOP Pemberian rekomendasi <i>Cellplant</i>					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraa n Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Perda 76 Tahun 2011 tentang SOP Pengembangan dan Pengelolaan TIK di Kabupaten Bantul	Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada, sebanyak 14	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional	Ada atau tidak ada jabatan fungsional	Ada, Jabatan fungsional Sebanyak 6	Tidak ada	Ada, jabatan fungsional Sebanyak 1	Ada	Tidak Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Pranata Komputer		pranata sandi			
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 38 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (3) Perangkat Daerah , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,47 %	0.01%	0,06 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 0 org - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 1 org - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	57,14 %	0%	100%
			8	Pejabat yang telah	Pejabat yang mengikuti	- Pejabat yang memenuhi	- Pejabat yang memenuhi	- Pejabat yang memenuhi	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				memenuhi persyaratan kepengkatan	kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	kepengkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	kepengkatan, sebanyak 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	kepengkatan, sebanyak 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada.Dokumen Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dok	3 jenis dok	3 jenis dok
			10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1	100%	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7	program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1			
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp22.989.451.729,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp367.715.000,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp805.233.577,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	0,92 %	0,01 %	0,03 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp21.933.237.352,09 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp355.743.400,00 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp777.812.184,00 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,96 %	0,02 %	0,03 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp19.218.712.667,09 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp21.933.237.352,09	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp355.743.400,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp355.743.400,00	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp777.812.184,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp777.812.184,00	87,62 %	100 %	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.714.524.685,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp21.933.237.352,09	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp355.743.400,00	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp777.812.184,00	12,38 %	0 %	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA,	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
					Calk)						
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada	Tidak Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp18.481.820.181,15	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 0,-	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 0,-	0 %	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Media elektronik Bantul Radio 3. Leaflet 4. Brosur 5. Website, Email	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Media elektronik Bantul Radio 3. Leaflet 4. Brosur 5. Website, Email	Jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Media elektronik Bantul Radio 3.Leflet 4.Brosur 5.Website, Email 7. Edaran	Jumlah sbyk 6jenis.	Jumlah sbyk 6jenis	Jumlah sbyk 6jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Kominfo	Urusan Statistik	Urusan Per- sandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				5. Mass Media		6. Edaran	6. Edaran				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Koperasi UKM (KUKM)
- Urusan Perindustrian
- Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Anggaran: Rp478.200.000,00 Realisasi: Rp471.875.000,00 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi anggaran Rp252.530.000,00 realisasi Rp244.330.000,00 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah anggaran Rp1.135.425.000,00 realisasi	1. Program Potensi Energi anggaran Rp96.953.500,00 realisasi Rp96.941.500,00	4 Program	4 Program	1 program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
						Anggaran: Rp474.590.000,00 realisasi: Rp456.696.000,00 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Anggaran: Rp238.350.000,00 Realisasi: Rp238.276.000,00 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Anggaran: Rp999.181.800,00 Realisasi: Rp943.159.640,-00	Rp1.111.740.000,00 3. Program penataan struktur industri anggaran Rp730.761.500,00 realisasi Rp679.351.620,00 4. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial anggaran Rp478.250.000,00 realisasi Rp473.525.060,00				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang	2	Keberadaan Standard Operating	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 7 SOP yang terdiri dari: 1.SOP Pemberian	Ada, Sebanyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP	Tidak Ada	Ada 7 SOP	Ada 4 SOP	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND		Procedure (SOP)		Hibah Barang 2.SOP Rekomendasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 3.SOP Pembukaan Kantor Kas Koperasi 4.SOP Pembukaan Kantor Kas Koperasi 5.SOP Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 6.SOP Ijin Usaha Simpan Pinjam 7.SOP Rekomendasi Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar	Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu 2. SOP Pelatihan 3. SOP Pameran 4. SOP Proses Persetujuan Prinsip				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 Tentang	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				Penyelenggaraan Urusan			Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2018				

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
							Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 4. Peraturan Bupati Bantul No. 21 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan				
3	PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan	Jumlah jabatan yang terisi dibagi	- Jabatan yang terisi sebanyak 11	- Jabatan yang terisi sebanyak 5 - Jabatan yang	- Jabatan yang terisi sebanyak 0	100 %	83,33 %	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
				eselonering yang terisi	jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak 11	ada, sebanyak 6	Jabatan yang ada, sebanyak 1			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada 1 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil	Ada 2 Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan ahli pertama Fungsional penyuluh pelaksana lanjutan perindustrian dan perdagangan	Tidak ada jabatan fungsional	Ada 1 jabatan	Ada 2 jabatan	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak 10 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (3) Perangkat Daerah, sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,38 %	0,12 %	0,01 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 0 org Pejabat yang ada, sebanyak 0 org.	72.73 %	75%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 0 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 0 jbt.	100 %	100 %	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra Perangkat	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra Perangkat	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra Perangkat	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Perangkat Daerah		- RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA-Perangkat Daerah	jumlahnya	Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dlm DPA Perangkat Daerah dibagi jml program dlm DPA Perangkat Daerah x100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp7.732.165.991,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.596.966.500,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp96.953.500,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	0,31 %	0,10 %	0,004 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp7.312.857.484,00 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.210.462.158.546,98	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.508.946.680,00 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.210.462.158.546,98	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp96.941.500,00 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.210.462.158.546,98	0,32 %	0,11 %	0,004 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp4.548.097.117,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp7.312.857.484,00	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.508.946.680,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.508.946.680,00	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp96.941.500,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp96.941.500,00	62,19 %	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.764.760.367,00 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp7.312.857.484,00	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.508.946.680,00	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp96.941.500,00	37,81 %	0 %	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 6.083.799.032,-	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.10.581.201.6 63	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp0,00	0 %	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk- bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Buklet 4. Publikasi Melalui media cetak dan elektronik 5. Website DKUKMP 6. Instagram 7. Facebook	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Buklet 4. Publikasi Melalui media cetak dan elektronik 5. Website DKUKMP 6. Instagram 7. Facebook	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Buklet 4. Publikasi Melalui media cetak dan elektronik 5. Website DKUKMP 6. Instagram 7. Facebook	Jumlah sbyk 7 jenis.	Jumlah sbyk 7 jenis	Jumlah sbyk 7 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		
						Urusan KUKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat		Ada	Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Penanaman Modal

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi anggaran Rp.479.450.000,- realisasi Rp.477.603.700,- 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi anggaranRp. 128.700.000,- realisasiRp. 128.507.000,- 3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi anggaran Rp.105.400.000,- realisasi Rp.100.550.000,- 4. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan anggaran Rp. 550.497.575,- realisasiRp. 540.773.075	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, 57 SOP : 1. Izin Lokasi 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Ada 57 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				3. Izin Usaha Industri (IUI) 4. Izin Perluasan Industri(IPI) 5. Tanda Daftar Gudang (TDG) 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 7. Izin Trayek 8. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 9. Izin Praktik Elektromedis 10. Izin Kerja Radiografer 11. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 12. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler 13. Izin Praktik Refraksionis Optisien (Izin Kerja Refraksionis Optisien) 14. Izin Praktik Perekam Medis (Izin Kerja Perekam Medis) 15. Izin Praktik Radioterapis 16. Izin Praktik Fisikawan Medik 17. Izin Praktik Audiologis 18. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (Izin Praktik Tehnisi Pelayanan Darah) 19. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan 20. Izin Praktik Entomolog Kesehatan 21. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 22. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan 23. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 24. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						25. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 26. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan 27. Izin Praktik Psikologi Klinis 28. Izin Praktik Ortosis Prostetis (Izin Kerja / Praktik Ortosis Prostetis) 29. Izin Praktik Tenaga Gizi (Izin Kerja / Praktek Tenaga Gizi) 30. Izin Praktik Terapis Wicara (Izin Kerja / Praktik Terapis Wicara) 31. Izin Praktik Okupasi Terapis (Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis dan Izin Praktik Okupasi Terapis) 32. Izin Praktik Fisioterapi 33. Izin Praktik Bidan (Izin Praktik / Kerja Bidan) 34. Izin Praktik Perawat (Izin Praktik/Kerja Perawat) 35. Izin Praktik Teknisi Gigi (Izin Kerja Teknisi Gigi) 36. Izin Mendirikan Rumah Sakit 37. Izin Operasional Rumah Sakit 38. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten 39. Izin Penyelenggaraan Optikal 40. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik 41. Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi 42. Izin Operasional Klinik	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						43. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama(Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama) 44. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 45. Izin Toko Obat 46. Izin Toko Alat Kesehatan(Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan) 47. Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 48. Pendaftaran Usaha Peternakan (Izin Usaha Peternakan) 49. Izin Praktik Penata Anestesi (Izin Kerja Perawat Anastesi) 50. Izin Praktik Sanitasi Lingkungan (Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan) 51. Izin Praktik Akupuntur 52. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Izin Praktik/Kerja Perawat Gigi) 53. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB G) 54. Izin Mendirikan Bangunan Bukan Gedung (IMBBG) 55. Izin Apotek (Izin Penyelenggaraan Apotek) 56. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang(Izin Trayek) 57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perumahan 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 17 - Jabatan yang ada, sebanyak 17	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 2 jabatan fungsional 1. Pranata Komputer Pertama (1 orang) 2. Pranata Komputer Pelaksana (3 orang)	Ada, 2 jabatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 33 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,41 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	70,59 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp6.517.890.471,00 - Total Belanja APBD, sebesar 	0,26 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					100%	Rp2.504.062.661.991,45	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp6.353.607.201,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0,28%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp4.139.009.736,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp6.353.607.201,00	65,14 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.214.597.465,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp6.353.607.201,00	34,86 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah,	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	sebanyak Rp.6.923.145.631,-	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Talkshow/siaran radio 7.Media sosial (facebook, instagram)	Jumlah sebanyak 7 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Kebudayaan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Kebudayaan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program: 1. Program Pengembangan Nilai Budaya anggaran Rp 4.600.190.000,- realisasi Rp 4.548.976.745,- 2. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya anggaran Rp 47.900.000,- realisasi Rp 45.900.000,- 3. Program Pengembangan Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda anggaran Rp 277.920.000,- realisasi Rp 273.195.500,- 4. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda anggaran Rp 584.450.000,- realisasi Rp 562.327.500,-	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 2 terdiri dari: 1. Sop Ttg Lomba Lukis Foto 2. Sop Ttg Fasilitasi / Even Penggiat Seni	Ada 2 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada, sebanyak 14	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada, Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 33 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,41 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	85,71 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp9.225.866.405,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,37 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp8.994.574.534,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,39 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp6.762.274.328,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp8.994.574.534,00	75,18 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.232.300.206,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp8.994.574.534,00	24,82 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 7.922.501.517,-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Pengumuman di Mass Media 2. Website 3. bifold	Jumlah sbyk 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang <i>Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</i>	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : Bantul

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Urusan Perpustakaan
- Urusan Kearsipan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1.Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Pagu anggaran Rp1.856.242.601,00 Realisasi: Rp1.703.187.735,22 2.Program Pelayanan perpustakaan. Pagu anggaran Rp468.420.000,00 Realisasi Rp465.960.000,00	1.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pagu: Rp305.346.588,00 Realisasi Rp301.269.400,00 2.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah, pagu anggaran Rp1.174.783.286,00 Realisasi Rp1.150.656.700,00 3.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.	2 Program	3 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
							Pagu anggaran Rp199.975.000,00 Realisasi Rp186.598.000,00		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, 11 terdiri dari: 1. Penyusunan Renstra 2. SOP Pembinaan perpustakaan 3. SOP pengadaan buku bahan pustaka 4. SOP pengolahan bahan pustaka perpustakaan 5. SOP layanan sirkulasi pustaka 6. SOP Penerbitan KTA 7. SOP Observasi dan Evaluasi perpustakaan keliling 8. SOP Penyiapan Bahan Kerja Layanan Perpustakaan Keliling 9. SOP Penjajaran Bahan Pustaka 10. SOP Penyusunan Renja 11. SOP Pengumpulan data kinerja	Ada, Sebanyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP peminjaman arsip 2. Akuisisi Arsip 3. Pemeliharaan Arsip (Restorasi)	Ada 12 SOP	Ada 3 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						12.SOP Permohonan NPSN			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraa n Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. PERDA Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. PERDA Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						pengelolaan Perpustakaan			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional: 1. Pustakawan Pelaksana 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan 3. Pustakawan Penyelia 4. Pustakawan Pertama	Ada Jabatan fungsional: 1. Arsiparis Madya 2. Arsiparis Mahir 3. Arsiparis Pelaksana 4. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 5. Arsiparis Penyelia	Ada 4 jabatan	Ada 5 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 10 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,38 %	0,12 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	90 %	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
					dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.	100 %	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 	100 %	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, 	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				dalam DPA Perangkat Daerah	dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak 2 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp8.444.939.852,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.680.104.874,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	0,34 %	0,07 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp7.879.999.864,22 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp1.638.524.100,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,34 %	0,07 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja	Total Belanja Langsung dari total belanja	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar	63,15 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah x 100%	Rp4.976.603.689,22 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp7.879.999.864,22	Rp.1.638.524.100,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.638.524.100,00		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.903.396.175,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp7.879.999.864,22	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.638.524.100,00	36,85 %	0 %
			17	Laporan keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp10.042.374.434,00	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp5.763.950.200,00	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Leaflet. 2. Website. 3. Mobil Keliling 4. Pameran/Ekspo/Car Free Day 5. Instagram 6. Facebook	Jenisnya 1. Leaflet. 2. Website. 3. Mobil pelayanan 4. Pameran/Ekspo 5. Instagram 6. Facebook	Jumlah sbyk 6 jenis.	Jumlah sbyk 6 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat IKM Unit Pelayanan	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Pariwisata

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Pariwisata

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata – anggaran Rp3.830.650.000,00 – realisasi Rp3.576.156.075,00 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata – anggaran Rp10.416.323.500,00 – realisasi Rp10.061.750.718,00 3. Program Pengembangan Kemitraan – anggaran Rp1.491.748.000,00 – realisasi Rp 1.472.305.800,00	3 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada,6 SOP, yang terdiri dari: 1. Penyusunan LKPJ 2. Penyusunan LPPD 3. Pemungutan Retribusi 4. Penanganan Pengaduan Masyarakat 5. Penatausahaan Pendapatan 6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Ada 6 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 13	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional Pranata Komputer	Ada 1 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan 66 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,82 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	84,62 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelatihan kepemimpinan	kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang memenuhi kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					ditetapkan pada RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp24.123.676.823,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,96 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp22.999.785.394,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63 	1,01 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp19.327.011.298,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 22.999.785.394,-	84,03 %
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.672.774.096,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp22.999.785.394,00	15,97 %	
	Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 61.878.443.895,61,-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Petunjuk Destinasi 2. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Papan Larangan Mandi dilaut	Jumlah sbyk 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang 1. Pelayanan Pokdarwis 2. Pelayanan Pembebasan/Keringanan Retribusi 3. Pelayanan Pemungutan Retribusi 4. Pelayanan PKL magang 5. Pelayanan Penelitian	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Dinas Perdagangan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Perdagangan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	6 Program: 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Anggaran : Rp 1.628.020.760,00 Realisasi: Rp 1.574.654.223,00 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor Anggaran : Rp1.510.315.000,00 Realisasi Rp1.502.871.750,00 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Anggaran: Rp148.783.000,00 Realisasi: Rp148.668.500,00 4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Anggaran : Rp 1.584.759.500,00 Realisasi: Rp 1.468.767.300,59 5. Program Pemberdayaan Pedagang Anggaran: Rp 1.158.119.671,00	6 program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Realisasi: Rp 1.142.285.200,00 6. Program Penataan Pasar Rakyat Anggaran: Rp8.477.466.161,00 Realisasi: Rp8.283.482.174,00	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 19 SOP 1. SOP tentang Penyelenggaraan Pameran 2. SOP tentang Penyelenggaraan Pelatihan 3. SOP tentang Rekomendasi Permohonan Perijinan Usaha Bidang Perdagangan 4. SOP tentang Pengelolaan Dana Bergulir 5. SOP tentang Pengenaan Retribusi dan Pajak Pasar 6. SOP tentang partisipasi kios 7. SOP tentang BKRD 8. SOP tentang lomba pasar 9. SOP tentang rekomendasi kios swadaya 10. SOP tentang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 11. SOP tentang Kebersihan dan Penanganan Sampah Pasar 12. SOP tentang Pelaksanaan Promosi Pasar 13. SOP tentang Pengawasan Terpadu Perdagangan 14. SOP tentang Kerjasama Pengelolaan	19 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sistem Resi Gudang 15. SOP tentang Pendataan PKL 16. SOP tentang Pembangunan Sentra Kuliner 17. SOP tentang Relokasi PKL di Sentra Kuliner 18. SOP tentang Pengajuan Pendaftaran UTTP di Kantor 19. SOP tentang Pengajuan Pendaftaran UTTP di Luar Kantor	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 9 Perda: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 3. Perda Nomor 12/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul . 4. Perda Nomor 17/2012 tentang Pengelolaan Pasar 5. Perda Nomor 2/2016 tentang Retribusi Jasa Umum	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6. Perda Nomor 13/2014 tentang Perijinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 7. Perda Nomor 7/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 8. Perda Nomor 7/2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir 9. Perda Nomor 21/2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang ada, sebanyak 16	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Nama jabatan fungsional: 1. Penera Madya 2. Penera Muda 3. Penera Mahir	Ada 3
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 109 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	1,36 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	56,25 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perangkat daerah yang ada x 100%		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang memenuhi kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi kepangkatan sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp29.717.231.622,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	1,18 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp28.730.936.360,59 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	1,29 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp22.347.518.723,59 - Total Realisasi Belanja Perangkat 	77,78 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				belanja Perangkat Daerah	Daerah x 100%	Daerah, sebesar Rp28.730.936.360,59	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp6.383.417.638,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp28.730.936.360,59	22,22 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 265.435.417.230,32,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Media cetak 2. Media Elektronik	Jumlah sebanyak 12 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PARTISIPASI MASYARAKAT			Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media		3. Media online (website) 4. Mobil Keliling 5. Papan Pengumuman 6. Kotak Saran 7. Email 8. Leaflet 9. Instagram 10. Twitter 11. Facebook 12. Baliho/Iklan Layanan Masyarakat	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1.Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah – Anggaran : Rp.70.682.000, – Realisasi : Rp.67.662.000,- 2.Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah – Anggaran : Rp.747.526.200,- – Realisasi : Rp.737.558.800,-	2 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 6 terdiri dari: 1. SOP Penyusunan LPPD 2. SOP Penyusunan SPM 3. SOP Penyusunan Perikatan Kerjasama 4. SOP Pelayanan Konsultasi 5. SOP Penegasan Batas Daerah 6. SOP Pembakuan Rupabumi	Ada 6 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1.Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada jabatan fungsional	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,15 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	50 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.346.298.700,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,05%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp1.290.701.755,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,06%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Laporan keuangan Perangkat Daerah	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.290.701.755,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.290.701.755,-	100 %
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.290.701.755,-	0 %	
	17		Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Baranag	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp1.434.745.840,00	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Media elektronik Bantul Radio 3.Pengumuman di Mass Media	Jumlah sbyk 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1.Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa – Anggaran : Rp1,063,081,000,- – Realisasi : Rp973,593,100,-	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 10 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pemberdayaan Lembaga Desa 2. SOP tentang Update Data Monografi 3. SOP tentang Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa 4. SOP tentang Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa 5. SOP tentang Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa 6. SOP tentang Pendampingan Administrasi Desa 7. SOP tentang Monev dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Ada 10 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						8. SOP tentang Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa 9. SOP tentang Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa 10.SOP tentang Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1.Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada, Jabatan fungsional	Tidak Ada
4		Tingkat kompetensi SDM dalam	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 12 personil	0,15 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait			terhadap Total PNS Kabupaten	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	
7			Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
			10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah dengan Program RKPD		program RENJA Perangkat Daerah	program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.495.418.200,-	0,06%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					100%	- Total Belanja APBD, sebesar Rp Rp2.504.062.661.991,45	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp1.337.856.072,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,06%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.337.856.072,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.337.856.072,-	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.337.856.072,-	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp598.359.101,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. E- Mail Bag. Pemdes 2. Sub domain (Website)	Jumlah sbyk 2 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan – Anggaran Rp. 637.628.200,- – Realisasi Rp. 596.543.900,-	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 3 SOP yang terdiri dari: 1. Mekanisme Pembuatan Peraturan Hukum Daerah Kabupaten Bantul 2. Pelayanan Bantuan Hukum 3. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.	Ada 3 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan	Ada atau tidak ada	1.Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyelenggaraan Urusan		Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dlm struktur organisasi Perangkat Daerah	tidak ada Jabatan Fungsional	Tidak Ada
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 14 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,18 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	75 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.031.037.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45 	0,04%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp978.535.370,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,04%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.978.535.370,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.978.535.370,-	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.978.535.370,-	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jml asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp706.704.956,00	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Pengumuman 2. Website 3. Talk show di Bantul Radio 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sbyk 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang mutu pelayanan pada Bagian Hukum	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1.Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, – Anggaran Rp292.251.000,- – Realisasi Rp287.750.360,-	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 3 terdiri dari: 1. SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP tentang LKj Sekretaris Daerah 3. SOP tentang Penyusunan Kebijakan Pembangunan	Ada 3 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1.Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 (1 kepala bagian dan 3 sub bagian)	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional 1. fungsional arsiparis (1 orang) 2. fungsional pranata komputer (1 orang)	Ada 2 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 10 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,12 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	50 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Pejabat yang mengikuti	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak 4 org.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				persyaratan kepangkatan	kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPД	10	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPД yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan Program RENJA Perangkat Daerah		diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp656.692.840,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45	0,03%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp646.772.078,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,03%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp646.772.078,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp646.772.078,00	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp646.772.078,00	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp1.026.644.586,-.	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Mass Media	Jumlah sbyk 3 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4.Mobil keliling 5.Mass Media			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah – Anggaran Rp.628.540.900 – Realisasi Rp. 619.228.100	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, SOP Pencairan Penyertaan Modal	Ada 1 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 14 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,17 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	75 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Pejabat yang mengikuti	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				persyaratan kepangkatan	kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah,	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				RKA Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak 3 program.	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.031.114.500,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,04%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp1.010.622.379,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,04%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.010.622.379 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.010.622.379 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.010.622.379	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - BI	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 662.421.900	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Web Site 2. Papan Pengumuman 3. Baliho	Jumlah sbyk 3 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan – Anggaran Rp559.158.000,- – Realisasi Rp530.073.000,-	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 3 terdiri dari: 1. SOP ttg Acara Seremonial 2. SOP ttg Penyelenggaraan Upacara dan Apel 3. SOP ttg Penerimaan Tamu Tingkat Daerah	Ada 3 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional 1. Jabatan fungsional Pranata Komputer	Ada 1 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,27 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	50 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.165.664.710,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,05%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp1.156.394.440,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,05%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.156.394.440,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.156.394.440,-	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.156.394.440,-	0 %
			Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 633.887.839,-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1.Website 2.Instagram	Jumlah sbyk 2 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur – Anggaran : Rp. 129.555.300,- – Realisasi : Rp. 97.701.400,- 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan – Anggaran : Rp. 121.440.000,- – Realisasi : Rp. 105.550.000 3. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah – Anggaran : Rp.260.352.500,- – Realisasi : Rp. 221.140.100,-	3 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 18 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Anjab Evaluasi 2. SOP ttg Anjab Konversi 3. SOP ttg Fasilitasi Penyusunan IKM 4. SOP ttg Evaluasi Penyusunan IKM 5. SOP ttg Peningkatan Kualitas Pelayanan	Ada 18 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Publik dengan Partisipasi Masyarakat (IPM) 6. SOP ttg Evaluasi Kedudukan dan Susunan OPD 7. SOP ttg Evaluasi Kedudukan dan Susunan UPT 8. SOP ttg Evaluasi Rincian Tugas OPD 9. SOP ttg Pembentukan Sekretariat 10. SOP ttg Pembentukan OPD 11. SOP ttg Laporan Semester Barang 12. SOP ttg Laporan Mutasi Barang 13. SOP ttg Pembuatan KIR 14. SOP ttg Penghapusan Barang 15. SOP ttg Penyusunan RKBMD 16. SOP ttg Usulan Pengajuan Gaji 17. SOP ttg Usulan Kekurangan Gaji 18. SOP ttg Penyusunan Draft Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional 1. Arsiparis	Ada 1 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,15 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	25 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp968.496.900,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,04%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp870.497.795,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,04%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp870.497.795,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp870.497.795,- 	100%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.870.497.795,- 	0%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) 2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 3. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 4. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) 5. Rencana Penghapusan Barang 6. Laporan Mutasi Barang	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 1.470.765.446.96	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Website 2. Banner 3. Siaran Radio	Jumlah sbyk 3 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Bagian Organisasi	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> – Anggaran Rp. 3.478.638.895,- – Realisasi Rp. 3.079.537.705,- 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> – Anggaran Rp. 89.324.000,- – Realisasi Rp. 87.569.050,- 	2 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan. Ada sebanyak 17 ,terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Peminjaman Tempat. 2. SOP ttg Pengelolaan Berita Masuk Keluar Berklasifikasi Rahasia melalui Faksimile. 3. SOP ttg Penyusunan RKBMD. 4. SOP ttg Pengajuan SPP Gaji Sekretariat. 5. SOP ttg Pengajuan SPP Kekurangan Gaji Sekretariat. 6. SOP ttg Pelayanan Administrasi Surat Masuk Setda. 	Ada 17 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7. SOP ttg Pelayanan Administrasi Surat keluar Setda. 8. SOP ttg Penemuan Kembali Surat Masuk Setda. 9. SOP ttg Penemuan Kembali Surat Keluar Setda. 10. SOP ttg Permohonan Cuti Tahunan Setda. 11. SOP ttg Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) Setda 12. SOP ttg Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) Setda 13. SOP ttg Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU) Setda 14. SOP ttg Pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM TU) Setda 15. SOP ttg Pengajuan Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa (SPP LS) Setda 16. SOP ttg Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung Barang Jasa (SPM LS) Setda 17. SOP Pemenuhan Fasilitasi Konsumsi	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyelenggaraan Urusan		Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 50 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,62 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4	75 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.20.420.454.604,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.504.062.661.991,45 	0,82%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.18.833.921.556,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.284.063.006.481,63 	0,82%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.817.379.203,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.833.921.556,-	41,5 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.016.542.353,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.833.921.556,-	58,5 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.69.627.394.725,-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Media elektronik Bantul Radio 3. Leaflet 4. Website, Email	Jumlah sbyk 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, – Anggaran Rp557.600.000,- – Realisasi Rp.534.457.900,- 2. Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, – Anggaran Rp7.695.175.889,- – Realisasi Rp7.344.071.747,-	2 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 5 terdiri dari: 1. SOP Monev Kebijakan Kesra 2. SOP Pemberdayaan Kaum Rois 3. SOP Penyelenggaraan Haji 4. SOP Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim 5. SOP Penyusunan NPHD	Ada 5 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan		Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 11 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,14 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org.	75 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelatihan kepemimpinan	kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah – RENSTRA Perangkat Daerah – RENJA Perangkat Daerah – RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yg ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.803.008.931,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.504.062.661.991,45	0,35%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.8.393.105.677,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0,37%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.393.105.677,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp. 8.393.105.677,-	100 %
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Rp. 8.393.105.677,-	0 %	
	Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Kartu Inventari Barang (KIB)s	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.8.432.662.990	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Sub Domain (Website)	Jumlah sbyk 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Anggaran Rp1.158.910.000,- – Realisasi Rp1.008.926.750,-	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Permohonan User ID PPK dan Pejabat 2. SOP Usulan Pemilihan Penyedia di UKPBJ	Ada 2 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Pranata Komputer Terampil	Ada 1 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 15 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,19 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	75 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.227.109.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,09%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.044.639.089,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,09%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.044.639.089,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.044.639.089,-	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.044.639.089,-	0 %
			17	Laporan keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - KIB B, KIB C, KIB E,	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp4.773.775.673.674,-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Email bagian LPBJ	Jumlah sbyk 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Anggaran : Rp. 23.451.307.493 Realisasi : Rp. 17.738.145.618	1 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Fasilitasi Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan DPRD 3. SOP Fasilitasi Rapat Komisi 4. SOP Fasilitasi Pembahasan Raperda 5. SOP Fasilitasi Penyusunan Prolegda 6. SOP Fasilitasi Penyusunan Raperda Prakarsa 7. SOP Penerbitan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Sekretaris	Ada 7 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada, sebanyak 14	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada, Jabatan fungsional	Tidak Ada Jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 44 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,55 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	92,31 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp26.869.022.632,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	1,07%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp20.927.999.303,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,92%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp17.738.145.618,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp20.927.999.303,-	84,76 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.189.853.685,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp20.927.999.303,-	15,24 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis Dokumennya. - Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp14.650.241.098,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan Pengumuman. 2. <i>Running text</i> 3. Website 4. Media cetak (Biwara) 5. Siaran TV (Gardu Projotamansari; Wedang Ronde)	Jumlah sbyk 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Publik	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur – anggaran Rp. 8.705.395.750,- – realisasi Rp. 8.062.152.516,- 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur – anggaran Rp. 528.537.000,- – realisasi Rp. 463.201.400,- 3. Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS – anggaran Rp. 790.644.000,- – realisasi Rp. 711.313.313,-	3 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 34 terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat 2. SOP Pelayanan Usulan Batas Usia Pensiun 3. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	Ada 34 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						4. SOP Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) 5. SOP Pemberian Ijin Perceraian Bagi PNS 6. SOP Penilaian Prestasi Kerja 7. SOP Pelaksanaan Uji Kesehatan PNS 8. SOP Penanganan Kasus Disiplin Bagi PNS 9. SOP Pemberian Ijin Cuti Besar 10. SOP Pemberian Ijin Cuti Diluar Tanggungan Negara 11. SOP Pemberian Tambahan Penghasilan 12. SOP Pengesahan Taperum 13. SOP Kalim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 14. SOP Pemrosesan Pengajuan Usul Calon Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 15. SOP Penerbitan Karis Karsu, Taspen 16. SOP Mutasi Antar Instansi Jabatan Fungsional Tertentu 17. SOP Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu masuk ke Bantul 18. SOP Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu keluar dari Bantul 19. SOP Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 20. SOP Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional 21. SOP Penetapan angka kredit 22. SOP Mutasi Antar Instansi Jabatan Administrasi dan JPT 23. SOP Mutasi Jabatan Administrasi dan	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>JPT masuk ke Bantul</p> <p>24.SOP Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT keluar dar Bantul</p> <p>25.SOP Pengangkatan dalam Jabatan Struktural</p> <p>26.SOP Pelayanan Pensiun BUP Golongan IV/B ke bawah</p> <p>27.SOP Pelayanan Pensiun atas permintaan sendiri gol III/d ke bawah</p> <p>28.SOP Ujian Dinas</p> <p>29.SOP Ujian Penyesuaian Ijazah</p> <p>30.SOP Pembuatan Ijin Belajar</p> <p>31.SOP Pembuatan SK Tugas Belajar</p> <p>32.SOP Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat</p> <p>33.SOP Penerimaan Tamu Obsevasi Lapangan</p> <p>34.SOP Penyelenggaraan Diklat</p>	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	<p>Ada:</p> <p>1.Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul</p>	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 - Jabatan yang ada, sebanyak 16	93,75 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 6 Jabatan Fungsional 1. Analis Kepegawaian Penyelia (2 orang) 2. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan (2 orang) 3. Pranata Komputer Pertama (1 orang) 4. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan (2 orang) 5. Asesor SDM Madya (1 orang) 6. Arsiparis Mahir (1 orang)	Ada 6 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah, sebanyak 54 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,68 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	53,33 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp97.507.013.449,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	3,89%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp92.952.639.470,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	4,07%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp11.114.254.137,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp92.952.639.470,-	11,96 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp81.838.385.333,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp92.952.639.470,-	88,04 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp3.552.654.702,01-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Website https://asn.bantulkab.go.id/ 2. Papan Pengumuman 3. Banner	Jumlah sbyk 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan nilai BAIK	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Badan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. – Anggaran 9.555.607.116,00 – Realisasi 8.119.581.535,00 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah – Anggaran 799.555.959,00 – Realisasi 636.275.600,00	2 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sbyk 105 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pajak Daerah (29) 2. SOP ttg PBB P2 (34) 3. SOP ttg Pajak BPHTB (6) 4. SOP ttg Bidang Anggaran (8) 5. SOP ttg Bid.Perbendaharaan (13) 6. SOP ttg Bid. Aset (9) 7. SOP ttg Bid. Akuntansi (6)	Ada 105 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 25 - Jabatan yang ada, sebanyak 26	96,15 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Nama bidang/jabatan fungsional : 1. Arsiparis terampil 2. Arsiparis pelaksana lanjutan 3. Pranata komputer terampil 4. Pranata komputer pelaksana 5. Pranata komputer pelaksana lanjutan 6. Pranata komputer pertama	Ada 6 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 107 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	1,33 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 25 org.	64 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 25 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp84.216.213.221,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	3,36 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp77.524.065.038,09 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	3,39 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp49.033.329.323,09 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp77.524.065.038,09	63,25 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp28.490.735.715,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp77.524.065.038,09	36,75 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, - Jenis dokumennya : Keputusan Bupati No. 558 Tahun 2015 tentang Hasil Sensus BMD	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 11.815.934.780,00	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Pos pengaduan (aplikasi lapor bantul) 2. Leaflet 3. Buku profile 4. Mobil keliling 5. Publikasi media cetak 6. Instagram 7. Facebook 8. Twitter 9. Spanduk 10. Website 11. Baliho 12. Buletin pajak	Jumlah sbyk 12 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- Statistik

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (Dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	6 Program: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran Rp1.595.049.500,00 Realisasi Rp1.525.419.800,00 2. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi Anggaran Rp1.120.610.700,00 Realisasi Rp.1.102.250.700,00 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Anggaran Rp.1.050.090.000,00 Realisasi	1 Program: 1. Program Pengembangan Data/Informasi Anggaran Rp352.770.000,00 Realisasi Rp338.060.000,00	6 Program	1 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Rp964.229.200,00 4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Anggaran Rp898.650.000,00 Realisasi Rp819.496.500,00 5. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran Rp151.445.000,00 Realisasi Rp142.875.000,00 6. Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah Anggaran Rp726.409.000,00 Realisasi Rp680.685.200,00			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 19 yang terdiri dari: 1. SOP Penyusunan Dokumen RPJPD 2. SOP penyusunan RPJMD	Ada, Sebanyak 19 yang terdiri dari: 1. SOP Penyusunan LAKIP	Ada 18 SOP	Ada 1 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Departemen / LPND				3. SOP penyusunan KUA-PPAS 4. SOP penyusunan RKPD 5. SOP-evaluasi perencanaan RPJPD 6. SOP-evaluasi perencanaan RPJMD 7. SOP-evaluasi pelaksanaan RPJPD 8. SOP-evaluasi pelaksanaan RPJMD 9. SOP-evaluasi hasil RPJPD 10.SOP-evaluasi hasil RPJMD 11.SOP-evaluasi perencanaan RKPD 12.SOP-evaluasi pelaksanaanRKPD 13.SOP-evaluasi hasil RKPD 14.SOP-pengendalian DAK 15.SOP-lap akhir DAK 16.SOP Penyusunan Renstra 17.SOP Penyusunan rencana kerja 18.SOP penetapan kinerja			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 17 - Jabatan yang ada, sebanyak 17	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dlm struktur	Ada, Jabatan fungsional Perencana 2 orang	Tidak ada jabatan fungsional	Ada 2 jabatan	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				organisasi Perangkat Daerah	organisasi Perangkat Daerah				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jml PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 35 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 7 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,44 %	0,09 %
	7		Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jml total pejabat perangkat daerah yg ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	70,59 %	50 %	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yg mengikuti kepangkatan di bagi jml total pejabat Prangkat Daerah yg ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah – RENSTRA Perangkat Daerah – RENJA Perangkat Daerah – RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPDP yg diakomodir dlm program RENJA Perangkat Daerah dibagi jml program dlm RENJA Perangkat Daerah yg ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	100 %	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.12.096.219.779,34 - Total Belanja APBD, sebesar	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp352.770.000,00 - Total Belanja APBD, sebesar	0,48 %	%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
						Rp2.504.080.336.991,45	Rp2.504.080.336.991,45		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp10.954.873.447,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.483,63	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp338.060.000,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.483,63	0,48 %	%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp8.094.563.982,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp10.954.873.447,00	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp338.060.000,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp338.060.000,00	73,89 %	100 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.860.309.465,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp10.954.873.447,00	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp0,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp338.060.000,00	26,11 %	0 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan keuangan	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
				Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	1. Neraca 2. CALK 3. LRA	1. Neraca 2. CALK 3. LRA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada, Jenis dokumennya. Buku Inventaris	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp8.153.106.330,00	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - sset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp0,00	0 %	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pengumuman Mass media	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pengumuman Mass media	Jumlah sbyk 2 jenis.	Jumlah sbyk 2 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Fungsi Penunjang	Urusan Statistik	Fungsi Penunjang	Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Inspektorat

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <ul style="list-style-type: none"> – Anggaran Rp193.880.000,00 – Realisasi Rp189.810.190,00 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH <ul style="list-style-type: none"> – Anggaran Rp1.479.899.576,00 – Realisasi Rp1.469.601.900,00 	2 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 24 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan Reguler/Sewaktu-Waktu 2. SOP Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan Kasus 3. SOP Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 4. SOP Analisis Tindak Lanjut LHP BPK-RI 5. SOP Pemutakhiran Data 6. SOP Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek 7. SOP Pelaksanaan Diklat/Bimtek 	Ada 24 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						8. SOP Penilaian Angka Kredit 9. SOP Reviu LKPD 10. SOP Tim Reviu LKPD 11. SOP Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah 12. SOP Tim Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah 13. SOP Tim Pemeriksaan Berkala 14. SOP Tim Pemeriksaan Sewaktu-Waktu 15. SOP Tim Pemeriksaan Kasus 16. SOP Pembuatan Buku PKPT 17. SOP Pengelolaan Keuangan 18. SOP PKPT Berbasis Risiko 19. SOP Pendampingan 20. SOP Konsultasi 21. SOP Penanganan Pengaduan 22. SOP Perhitungan Kerugian Negara 23. SOP Pengumpulan Data Kinerja 24. SOP Crash Program	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten	Ada/tidak ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 10 - Jabatan yang ada, sebanyak 10	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, jabatan fungsional sbb: 1. Auditor Penyelia (3) 2. Auditor Pertama (1) 3. Auditor Ahli Pertama (1) 4. Auditor Kepegawaian Ahli Pertama (1) 5. Auditor Muda (8) 6. Madya (5) 7. P2UPD Muda (7) 8. P2UPD Madya (3) 9. Pranata Komputer Terampil (1) 10. Arsiparis Terampil(2)	Ada 10 jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 50 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,62 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	90 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp6.779.567.836,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.062.661.991,45 	0,27%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp6.474.968.233,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,28 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.717.851.748,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp6.474.968.233,00	41,97%
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.757.116.485,- - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp6.474.968.233,00	58,03%	
	Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.2.839.341.813,-	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan (SMS Center) 3. Email OPD 4. Website 5. <i>Whistle Blower System</i>	Jumlah sbyk 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Kasihan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan pelayanan masyarakat – Anggaran Rp. 61.000.000,- – Realisasi Rp60.981.00,- 2. Program pembinaan pemerintahan umum – Anggaran Rp134.400.000,- – Realisasi Rp133.900.000,- 3. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan – Anggaran Rp100.503.500,- – Realisasi Rp.100.503.500,- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan – Anggaran Rp20.000.000,- – Realisasi Rp20.000.000,-	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 20 yang terdiri dari: 1. Permohonan legalisasi 2. laporan semester barang daerah 3. Pelayanan kenaikan pangkat	Ada 20 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				4. Kenaikan gaji berkala 5. Pelayanan usulan pensiun 6. Pembuatan kartu inventaris ruang 7. Mutasi barang daerah 8. Penghapusan barang daerah 9. Penyusunan RKA 10. Perubahan anggaran kecamatan 11. Rencana Kerja Kecamatan 12. Permohonan administrasi kependudukan 13. Laporan monografi 14. Pelayanan rekomendasi perijinan 15. Pelayanan rekomendasi non perijinan 16. Musrenbang kecamatan 17. Laporan penyelenggara pemerintah daerah 18. PATEN 19. Piket kecamatan 20. RKBM kecamatan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,27 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	88,89 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yg diakomodir dlm RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dlm RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.557.085.066,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45 	0,1 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.369.126.413,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63 	0,1 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp887.169.239,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.369.126.413,00 	37,45%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.481.957.174,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.369.126.413,00 	62,55 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp 2.173.665.480,86	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Laeflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Laeflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kec. Kasihan	Jumlah sbyk 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Layanan Paten	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Bambanglipuro

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 Program 1. Program Peningkatan pelayanan masyarakat, – Anggaran Rp7.250.000, – Realisasi Rp7.250.000,- 2. Program pembinaan pemerintahan Umum – Anggaran Rp165.092.000,- – Realisasi Rp 164.892.000,- 3. Program pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan, – Anggaran Rp 121.475.000,- – Realisasi Rp 121.475.000,- 4. Program pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan, – Anggaran Rp 44.250.000,- – realisasi Rp 44.250.000,-	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 9 yang terdiri dari: 1. SOP Penyusunan LAKIP 2. SOP Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 3. SOP Penyusunan Monografi Kecamatan 4. SOP Penyusunan LPPD 5. SOP Penyusunan Renja 6. SOP Permohonan Administrasi Kependudukan 7. SOP Pelayanan Rekomendasi Perijinan 8. SOP Pelayanan Rekomendasi Non Perijinan 9. SOP Legalisasi	Ada 9 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,22 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	55,56 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah – RENSTRA Perangkat Daerah – RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah – RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dlm program RENJA Perangkat Daerah dibagi jml program dlm RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.357.139.010,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0.09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.153.002.183,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0.09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp845.623.315,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.153.002.183,00	39,28%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.307.378.868,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.2.153.002.183,00	60,72%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				atau asset Perangkat Daerah	Daerah		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp2.365.728.972,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kec. Bambanglipuro 5. Facebook 6. Instagram	Jumlah sbyk 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan SKM tentang Layanan Paten	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Banguntapan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program 1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, – anggaran Rp8.850.000,- – realisasi Rp8.850.000,- 2. Program Pembinaan pemerintahan Umum, – anggaran Rp173.775.000,- – realisasi Rp173.775.000,- 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan, – anggaran Rp92.631.000,- – realisasi Rp92.631.000,- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan, – anggaran Rp53.395.000,- – realisasi Rp53.395.000,-	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Perijinan 2. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Non Perijinan 3. SOP ttg Permohonan Adminstrasi Kependudukan 4. SOP ttg Penyusunan Monografi Kecamatan 5. SOP ttg Musrenbang Kecamatan	Ada 5 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jml jabatan yg terisi dibagi jml jabatan yg ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam	Ada atau tidak ada jabatan fungsional	Tidak Ada	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				struktur organisasi Perangkat Daerah	dalam struktur organisasi Perangkat Daerah		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,22 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	88,89 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				- -RENJA Perangkat Daerah - -RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yg diakomodir dlm RKA Perangkat Daerah dibagi jml program dlm RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yg diakomodir dlm DPA Perangkat Daerah dibagi jml program dlm DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.591.493.083,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.504.080.336.991,45	0.1 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.2.406.878.247,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0,11 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.981.391.389,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.406.878.247,-	40,77 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.425.486.858,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.406.878.247,-	59,23 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 2.331.683.725,82	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	6 Jenis 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Kotak saran di seksi pelayanan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kec. Banguntapan (website) 5. Instagram 6. Facebook	Jumlah sebanyak 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan SKM tentang layanan PATEN	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Dlingo

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, – anggaran Rp15.270.000,00 – realisasi Rp15.270.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, – anggaran Rp130.995.000,00 – realisasi Rp130.995.000,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan, – anggaran Rp93.390.000,00 – realisasi Rp93.2850.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan, – anggaran Rp53.500.000,00 – realisasi Rp53.500.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 10 SOP, terdiri dari SOP tentang : 1. Pelayanan Rekomendasi Perijinan 2. Permohonan rekomendasi non perijinan 3. Penyusunan rencana kerja	10 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				4. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) 5. Permohonan administrasi kependudukan 6. Permohonan legalisasi 7. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 8. Penyusunan monografi kecamatan 9. Pelaksanaan musrenbang kecamatan 10. Pelaksanaan piket kantor kecamatan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam	Ada atau tidak ada jabatan fungsional	Tidak ada	Tidak ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				struktur organisasi Perangkat Daerah	dalam struktur organisasi Perangkat Daerah		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat daerah, sebanyak 17 personel Total PNS Kabupaten sebanyak 8011 personel	0,21 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 6 Org Pejabat yang ada sebanyak 9 org	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 9 Org Pejabat yang ada sebanyak 9 Org	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra Perangkat Daerah - Renja Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPDP yg diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jml program dalam RENJA Perangkat Daerah yg ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp1.915.637.417,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.504.080.336.991,45	0,08 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp1.831.327.628,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.483,63	0,08 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp802.675.423,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.831.327.628,00	43,83 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.028.652.205,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp1.831.327.628,00	56,17 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.2.812.821.565,00 	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan di seksi Pelayanan 3. Leaflet di seksi Pelayanan 4. Sub Domain kecamatan	Jumlah sebanyak 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan masyarakat tentang layanan PATEN	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Imogiri

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 program 1. Progam Peningkatan pelayanan Masyarakat – Anggaran Rp13.350.000,00 – realisasi Rp13.350.000,- 2. Progam Pembinaan Pemerintahan Umum – Anggaran Rp203.350.000,00 – Realisasi Rp203.350.000,- 3. Progam pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggran Rp 89.250.000,00 – Realisasi Rp89.250.000,00 4. Progam Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan – Anggaran Rp97.450.000,00 – Realisasi Rp97.450.000,00	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 8 SOP yang terdiri dari: 1. Permohonana administrasi kependudukan 2. Laporan monografi 3. Pelayanan rekomendasi perijinan 4. Pelayanan rekomendasi non perijinan 5. Musrenbang kecamatan 6. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 7. PATEN 8. IUMK	Ada 8 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 17 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,21 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perangkat Daerah x 100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.231.706.749,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.177.073.829,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,1 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp868.972.155,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.177.073.829,00	39,91 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.308.101.674,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.177.073.829,00	60,09 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.2.351.814.095,33	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	6 jenis 1. Papan Pengumumam. 2. Pos Pengaduan 3. leaflet. 4. email. 5. IG 6. Face Book	Jumlah sebanyak 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Pajangan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 Program, antara lain: 1. Program peningkatan pelayanan masyarakat – Anggaran Rp12.075.000,00 – realisasi Rp12.075.000,00 2. Program pembinaan pemerintahan umum – Anggaran Rp225.155.000,00 – realisasi Rp224.445.000,00 3. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan – Anggaran Rp12.575.000,00 – realisasi Rp11.825.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan – Anggaran Rp64.820.000,00 – Realisasi Rp64.820.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 6 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Perijinan	Ada 6 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				2. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Non Perijinan 3. SOP ttg Permohonan Administrasi Kependudukan 4. SOP ttg Penyusunan Monografi Kecamatan 5. SOP ttg Musrenbang Kec 6. SOP Pelayanan legalisir dokumen	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat	Tidak Ada, Jabatan fungsional	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Daerah		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,22 %
	7		Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.100.157.219,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,08 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.067.522.592,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp868.372.785,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.067.522.592,00	42 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.199.149.807,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.067.522.592,00	58 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.2.877.478.612,32	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kec. Pajangan (website) 5. Instagram 6. Facebook	Jumlah sebanyak 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Layanan Paten	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Pandak

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program yaitu 1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat – Anggaran : Rp30.575.000,00 – Realisasi : Rp21.625.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan – Anggaran : Rp167.275.000,00 – Realisasi : Rp167.440.000,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggaran : Rp.114.824.500,00 Realisasi Rp108.544.500,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan – Anggaran : Rp84.800.000,00 – Realisasi Rp79.450.000,00	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 8 yang terdiri dari: 1. SOP ttg IUMK 2. SOP ttg Rekomendasi Non Perijinan 3. SOP ttg Rekomendasi Perijinan 4. SOP ttg Musrenbang Kecamatan 5. SOP ttg Monografi 6. SOP ttg LPPD 7. SOP ttg Piket Kecamatan 8. SOP ttg Legalisasi	Ada 8 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 21 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,26 %
	7		Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67%	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.422.763.488,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,1 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.262.265.663,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,1 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp837.797.928,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.262.285.663,00	37,03 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.424.467.735,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.262.285.663,00	62,97 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.2.793.020.827,32	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	3 jenis 1. Papan Informasi Pelayanan 2. Leaflet 3. Sub domain	Jumlah sebanyak 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang survey kepuasan tentang Pelayanan Paten	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Pundong

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program : 1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat – Anggaran Rp23.472.000,00 – Realisasi Rp23.447.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum – Anggaran Rp220.187.500,00 – Realisasi Rp220.022.500,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan. – Anggaran Rp133.250.000,00 – Realisasi Rp133.210.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat. – Anggaran Rp44.250.000,00 – Realisasi Rp44.245.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Permohonan administrasi kependudukan 2. SOP ttg permohonan legalisasi	Ada 7 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				3. SOP ttg Penyusunan LPPD 4. SOP ttg Pnyusunan monografi kecamatan 5. SOP ttg Pelaksanaan musrenbang 6. SOP ttg Permohonan rekomendasi non perijinan 7. SOP ttg Pelayanan rekomendasi perijinan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jml jabatan yg terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada jabatan fungsional	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,24 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	77,78 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 jenis dokumen
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat	Jumlah Program RKPd yang	Jumlah Program	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah dengan Program RKPD		diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.202.563.099,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.128.378.998,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.483,63	0,09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp864.337.319,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.128.378.998,00	40,61 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.264.041.679,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.128.378.998,00	59,39 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				atau asset Perangkat Daerah	Daerah		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.3.150.817.563,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	6 Jenis 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Laeflet di seksi pelayanan 4. Bener 5. Website Komputer untuk internet pemohon	Jumlah sebanyak 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Sanden

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 program, yakni: 1. Program Peningkatan pelayanan masyarakat, – Anggaran: Rp13.773.750,00 – Realisasi: Rp 12.923.570,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, – Anggaran : Rp160.338.500,00 – Realisasi : Rp159.490.390,00 3. Program Pembinaan sosial Kemasyarakatan Kecamatan, – Anggaran : Rp115.512.500,00 – Realisasi : Rp114.890.250,00 4. Program pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan, – Anggaran : Rp 125.685.000,00 – Realisasi : Rp125.559.530,00	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 9 SOP yang terdiri dari: 1. Permohonan administrasi kependudukan 2. Laporan monografi 3. Pelayanan rekomendasi perijinan 4. Pelayanan rekomendasi non perijinan 5. Musrenbang kecamatan 6. Laporan penyelenggara pemerintah daerah 7. PATEN 8. Piket kecamatan 9. IUMK	9 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jml jabatan yg terisi dibagi jml jabatan yg ada x100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dlm strktr organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,22 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.427.717.355,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,1 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.240.306.959,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,1 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp992.474.540,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.240.306.959,00	44,30 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.247.832.419,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.240.306.959,00	55,7 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp3.832.761.662,00 aset	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain 5. Email kecamatan	Jumlah sbyk 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan masyarakat tentang layanan PATEN	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Sedayu

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program: 1. Program Peningkatan pelayanan Masyarakat – Anggaran : 17.800.000 – Realisasi : 17.750.000 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum – Anggaran : Rp 135.950.000 – Realisasi : Rp 135.950.000 3. Program Pembinaan sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggaran : Rp 44.900.000 – Realisasi: Rp 44.900.000 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan – Anggaran: Rp 11.000.000 – Realisasi: Rp 11.000.000	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Ada sebanyak 9 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Permohonan Administrasi Kependudukan 2. SOP ttg Laporan Monografi 3. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Perjinan 4. SOP ttg Rekomendasi Non Perijinan 5. SOP ttg Musrenbang Kecamatan 6. SOP ttg Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. SOP ttg PATEN 8. SOP ttg Piket Kecamatan 9. SOP ttg IUMK 	Ada 9 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	<p>Ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 24 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,3 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	77,78 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.496.389.426,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45 	0,1 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.362.429.855,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63 	0,10 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp860.323.039,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.362.429.855,00 	36,42 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.502.106.816,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.362.429.855,00 	63,58 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.1.521.079.448,22	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Sub domain 5. Facebook 6. Instagram	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Pelayanan Paten	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Sewon

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Rp32.215.000,00 Rp32.215.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Anggaran Rp240.940.000,00 Realisasi Rp240.380.000,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Anggaran Rp227.275.000,00 Realisasi Rp226.900.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Anggaran Rp40.320.000,00 Realisasi Rp40.320.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 9 yang terdiri dari: 1. Permohonan administrasi kependudukan 2. Laporan monografi 3. Pelayanan rekomendasi perijinan	Ada 9 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				4. Pelayanan rekomendasi non perijinan 5. Musrenbang kecamatan 6. Laporan penyelenggara pemerintah daerah 7. PATEN 8. Piket kecamatan 9. IUMK	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,29 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada.Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.711.604.976,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.504.080.336.991,45	0,11 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.544.961.474,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0,11 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.024.012.524,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.544.961.474,00	40,24 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.520.948.950,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.544.961.474,00	59,76 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.1.598.715.436,06,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	6 Jenisnya 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kecamatan 5. Facebook 6. E-mail Kecamatan	Jumlah sebanyak 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada survey kepuasan tentang Layanan Paten	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Srandakan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program 1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat – anggaran Rp12.500.000,00 – realisasi Rp9.990.000,00 2. Pembinaan Pemerintahan Umum – anggaran Rp217.120.000,00 – realisasi Rp217.120.000,00 3. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggaran Rp64.590.000,00 – Realisasi Rp64.190.000,00 4. Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan – Anggaran Rp56.151.000,00 – Realisasi Rp56.151.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 6 terdiri dari: 1. SOP ttg Pengelolaan Anggaran 2. SOP TTG Pengelolaan Anggaran (UP) Kecamatan	Ada 6 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. SOP ttg Perubahan Anggaran Kecamatan 4. SOP ttg Penyusunan RKA 5. SOP ttg Pelaksanaan Musrenbang 6. SOP ttg Permohonan Rekomendasi Non Perijinan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada, Jabatan fungsional	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 17 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,21 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah – RENSTRA Perangkat Daerah – RENJA Perangkat Daerah – RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.209.396.471,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.043.692.922,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.284.063.006.481,63	0,09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp866.886.886,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.043.692.922,00	42,42 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.176.806.036,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.043.692.922,-	57,58 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.3.070.038.339,34	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Media elektronik Bantul Radio 3. Leaflet 4. Brosur 5. Website 6. Email	Jumlah sbyk 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Bantul

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 Program, yaitu: 1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Anggaran Rp8.100.000,00 Realisasi Rp8.100.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum. Anggaran Rp143.549.500,00 Realisasi Rp143.549.500,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan. Anggaran Rp71.346.000,00 Realisasi Rp71.346.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Anggaran Rp51.550.000,00 Realisasi Rp51.550.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 6 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Monografi 2. SOP ttg Kependudukan	Ada 6 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				3. SOP ttg LPPD 4. SOP ttg Musrenbang 5. SOP ttg Rekomendasi Non Perjinan 6. SOP ttg Rekomendasi Perizinan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Jabatan fungsional Arsiparis	Ada 1 jabatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah, sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,24 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.250.833.539,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.139.922.328,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp818.567.555,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.139.922.328,-	38,25%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.321.354.773,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.139.922.328,00	61,75%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp2.220.833.539,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kec. Bantul (website)	Jumlah sebanyak 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Layanan Paten	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Kretek

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 program 1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Anggaran Rp37.700.000,00, Realisasi Rp37.700.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Anggaran Rp212.970.000,00 Realisasi Rp212.970.000,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Anggaran Rp153.050.000,00 Realisasi Rp153.050.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Anggaran Rp33.850.000,00 Realisasi Rp33.850.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 6 SOP yang terdiri dari: 1. Permohonan administrasi kependudukan 2. Laporan monografi	Ada 6 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				3. Pelayanan rekomendasi perijinan 4. Pelayanan rekomendasi non perijinan 5. PATEN 6. IUMK	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jml jabatan yang terisi dibagi jml jabatan yg ada x100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,22 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.266.306.683,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.130.826.755,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar	0,09 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Realisasi Belanja APBD	Belanja APBD x 100%	Rp2.284.063.006.481,63	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp961.999.601,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.130.826.755,00	45,15 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.168.827.154,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.130.826.755,00	54,85 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp1.111.117.740,62	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	4 Jenis 1. Papan pengumuman di seksi pelayanan 2. Pos pengaduan di seksi pelayananan 3. Laeflet di seksi pelayanan 4. Sub domain kec.	Jumlah sebanyak 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Layanan Paten	Ada

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Piyungan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program 1. Peningkatan Pelayanan masyarakat – Anggaran Rp37.700.000,00 – realisasi Rp37.700.000,00 2. Pemerintahan Umum Kecamatan – Anggaran Rp212.970.000,00 – realisasi Rp212.970.000,00 3. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggaran Rp153.050.000,00 – realisasi Rp153.050.000,00 4. Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan – Anggaran Rp33.850.000,00 – realisasi Rp33.850.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Perijinan	Ada 5 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. SOP ttg Pelayanan Rekomendasi Non Perijinan 3. SOP ttg Permohonan Administrasi Kependudukan 4. SOP ttg Penyusunan Monografi Kecamatan 5. SOP ttg Musrenbang Kecamatan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jml jabatan yang terisi dibagi jml jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dlm struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,22 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	88,89 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.278.645.698,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45 	0,09 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.067.649.945,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp859.993.302,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -2.067.649.945	41,59 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.207.656.663,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.067.649.945,00	58,41 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yg ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jml asset yg tdk digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yg dikuasai Perangkat Daerah x	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp2.696.805.900,00	0 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					100 %		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada 6, Jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Media elektronik Bantul Radio 3. Leaflet 4. Brosur 5. Website, Email 6. Edaran	Jumlah sbyk 6 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey tentang Kepuasan Masyarakat	Ada

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Jetis

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 4 Program 1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat – Anggaran Rp22.500.000,00 – Realisasi Rp22.500.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum – Anggaran Rp177.800.000,00 – Realisasi Rp177.800.000,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggaran Rp105.650.000,00 – Realisasi Rp105.650.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan – Anggaran Rp123.250.000,00 – Realisasi Rp123.250.000,00	4 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 9 yang terdiri dari: 1. Permohonan administrasi kependudukan 2. Laporan monografi 3. Pelayanan rekomendasi perijinan 4. Pelayanan rekomendasi non perijinan 5. Musrenbang kecamatan 6. Laporan penyelenggara pemerintah daerah 7. PATEN 8. Piket kecamatan 9. UMK	Ada 9 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					100%		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 17 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,21 %
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,67 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jml Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jml Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jml Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perangkat Daerah x 100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.231.683.338,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,09 %
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.045.284.055,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,09 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp974.125.477,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.045.284.055,00	47,63 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.071.158.578,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.045.284.055,00	52,37 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7		Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi barang	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			atau asset Perangkat Daerah	atau asset Perangkat Daerah		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.3.184.201.917,32	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada 5 Jenis 1. Papan Pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet di seksi pelayanan 4. Sub domain Kec. jetis 5. Email kecamatan	Jumlah sebanyak 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey tentang kepuasan masyarakat	Ada

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kecamatan Pleret

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat – Anggaran Rp15.175.000,00 – Realisasi Rp15.175.000,00 2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum – Anggaran Rp191.385.000,00 – Realisasi Rp191.385.000,00 3. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan – Anggaran Rp118.150.000,00 – Realisasi Rp118.150.000,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan – Anggaran Rp62.800.000,00 – Realisasi Rp62.695.000,00	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Legalisasi	Ada 4 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintah cq Departemen / LPND				2. SOP ttg Musrenbang 3. SOP ttg Kependudukan 4. SOP Monografi	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.011 personil	0,25 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	77,78 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.452.454.814,20 - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45 	0,1 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.279.044.727,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,1 %
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp862.331.293,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.279.044.727,00	37,84 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.416.713.434,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.279.044.727,00	62.16 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp1.363.630.038,00 	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	5 Jenis 1. Papan pengumuman 2. Kotak pengaduan 3. Subdomain Kecamatan 4. IG kec.pleret 5. Facebook kec Pleret	Jumlah sebanyak 5jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey Kepuasan Masyarakat	Ada

c. Urusan Pemerintahan Umum

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Kantor Kesbangpol

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- Pemerintahan Umum

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan – Anggaran : Rp. 283.950.000,- – Realisasi Rp. 279.185.000,- 2. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan – Anggaran Rp. 123.490.000,- – Realisasi Rp. 114.256.000,- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan – Anggaran Rp 200.185.000,- – Realisasi Rp. 198.830.000,- 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) – Anggaran Rp. 92.850.000,- 5. Realisasi Rp. 80.200.000,-Program Pendidikan Politik Masyarakat – Anggaran Rp. 309.325.000,-	5 Program

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						– Realisasi Rp. 272.682.000,-	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 4 terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan rekomendasi FKUB pendirian tempat ibadah 2. SOP Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Ormas, Orsos, LSM dan Partai Politik. 3. SOP Bantuan Keuangan Partai Politik 4. SOP Konseling Pelajar tdk disiplin	Ada 4 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada: 1. Perda no 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Perda 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 8 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada, Jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Perangkat Daerah , sebanyak 15 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8011 personil	0,19 %
	7		Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	75 %	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang mengikuti kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada Tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				- -RENJA Perangkat Daerah - -RKA- Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perangkat Daerah x 100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp2.990.093.495,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.504.080.336.991,45	0,12%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp2.819.326.066,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.284.063.006.481,63	0,12%
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.701.631.102,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.819.326.066,----	60,35 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp1.117.694.964,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp2.819.326.066,-	39,64 %
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7		Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi barang	Ada, Jenis dokumennya. - Buku Inventaris	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			atau asset Perangkat Daerah	atau asset Perangkat Daerah		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 1.318.568.551,-	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya 1. Facebook 2. Instagram 3. Subdomain kesbangpol 4. Email kesbangpol 5. Laportantul 6. Leaflet	Jumlah sbyk 5 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang kepuasan tentang <i>Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</i>	Ada

IKK.III.3

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**



C. Indikator Kinerja Kunci

Tataran Pelaksana Kebijakan

LAMPIRAN: III.3 FORMAT UNTUK KABUPATEN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : BANTUL

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN WAJIB					
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{27.060}{27.338} \times 100 \% = 98,98 \%$
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	$\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah pendidik di PAUD}} \times 100\%$	$\frac{1.438}{1.816} \times 100 \% = 79,19 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini}} \times 100\%$	$\frac{509}{519} \times 100\% = 98,07\%$
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia > 15 thn}} \times 100\%$	$\frac{739.417}{748.389} \times 100\% = 98,8\%$
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{81.294}{86.394} \times 100\% = 94,10\%$
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{39.578}{40.424} \times 100\% = 97,91\%$
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yang sama & jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{3}{81.294} \times 100\% = 0,004\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yang sama \& jenjang SMP/MTs}} \times 100\%$ pd tahun ajaran sebelumnya	$\frac{4}{39.578} \times 100\% = 0,01\%$
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah pendidik jenjang Sekolah Dasar yg memiliki ijazah D – IV atau Sarjana (S1) , dan sertifikat Profesi guru Sekolah Dasar}}{\text{Jumlah Pendidik jenjang Sekolah Dasar}} \times 100\%$	$\frac{4.778}{5.072} \times 100\% = 94,2\%$
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah pendidik jenjang Menengah Pertama yg memiliki ijazah DIV atau Sarjana (S1) , dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Menengah Pertama}}{\text{Jumlah Pendidik jenjang Menengah Pertama}} \times 100\%$	$\frac{3.052}{3.205} \times 100\% = 95,23\%$
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP}} \times 100\%$	$\frac{508}{511} \times 100\% = 99,41\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{12.777}{12.777} \times 100\% = 100\%$
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{12.402}{12.402} \times 100\% = 100\%$
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{13.895}{12.777} \times 100\% = 108.75\%$
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{1.729}{1.729} \times 100\% = 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.220}{949.325} \times 100\% = 0,13\%$
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{13}{16} \times 100\% = 81,25\%$
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$	$\frac{3.621}{949.325} = 0,38$
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{13.848}{14.312} \times 100\% = 96,76\%$
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{13.087}{13.088} \times 100\% = 99,99\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{10.998}{13.072} \times 100\% = 84,13\%$
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{42.175}{60.005} \times 100\% = 70,29\%$
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{27.861}{27.861} \times 100\% = 100\%$
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{98.438}{153.626} \times 100\% = 64,08\%$
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{41.063}{49.942} \times 100\% = 82,22\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			skrining kesehatan sesuai standar		
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{29.337}{29.337} \times 100\% = 100\%$
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{11.954}{11.954} \times 100\% = 100\%$
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2.999}{2.999} \times 100\% = 100\%$
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{9.022}{9.224} \times 100\% = 97,81\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumah orang dengan resiko HIV di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{12.589}{12.589} \times 100 \% = 100 \%$
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\%$	$\frac{75}{75} \times 100 \% = 100 \%$
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu sama}} \times 100\%$	$\frac{(199 + 3.725)}{(199 + 3.725)} \times 100 \% = 100 \%$
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 th}}{\text{Jumah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	$\frac{1.424}{1.424} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Ibu Melahirkan}} \times 100.000$	$\frac{13}{13.088} \times 100.000 = 99,33$
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	$\frac{468,97}{624,47} \times 100.000 = 75,10$
		36	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi /direkonstruksi}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi}} \times 100\%$	$\frac{41,015}{53,41} \times 100 \% = 76,79 \%$
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang g pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan pipa terlindungi di dalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut}} \times 100\%$	$\frac{325.082}{325.082} \times 100 \% = 100 \%$
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{264.559}{264.559} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.150}{1.612} \times 100 \% = 71,34 \%$
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	$\frac{403}{403} \times 100 \% = 100 \%$
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	$\frac{325.082}{325.082} \times 100 \% = 100 \%$
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	$\frac{325.082}{325.082} \times 100 \% = 100 \%$
		45	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	$\frac{0,0598}{506,85} \times 100 \% = 0,0118 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	$\frac{1.798,83 (ha)}{12.544 (ha)} \times 100 \% = 14,34 \%$
		47	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahunn eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{7.096}{8.634} \times 100 \% = 82,19 \%$
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{110}{110} \times 100 \% = 100 \%$
		49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		50	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha}} \times 100\%$	$\frac{29,18}{35,16} \times 100 \% = 82,99 \%$
		51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah kumuh}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.098}{264.559} \times 100 \% = 0,42 \%$
		52	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{15.940}{264.559} \times 100 \% = 6,03 \%$
		53	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs}} \times 100\%$	$\frac{263.461}{264.559} \times 100 \% = 99,58 \%$
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{80}{80} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		55	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{22}{31} \times 100 \% = 70,97 \%$
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16.655
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.234
		58	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		59	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dlm tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{227}{227} \times 100 \% = 100 \%$
		60	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit
		61	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	$\frac{\text{Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP}} \times 100\%$	$\frac{3}{49} \times 100 \% = 6,12 \%$
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	$\frac{12.213}{16.250} \times 100 \% = 75,16 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			panti (Indikator SPM)		
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{92}{92} \times 100 \% = 100 \%$
		64	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	$\frac{\text{Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar}}{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng}} \times 100\%$	$\frac{43}{16.250} \times 100 \% = 0,26 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga}} \times 100\%$	$\frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial profesional dan tenaga kerja sosial dan atau relawan sosial yang ada}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina}} \times 100\%$	$\frac{1.235}{16.250} \times 100\% = 7,60\%$
7	Tenaga Kerja	67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{31}{40} \times 100\% = 77,5\%$
		68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{6.614}{57.047} \times 100\% = 11,59\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	$\frac{19.088.689.000.000}{57.047} \times 100\% = 33.461.337.143\%$
		70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{235}{720} \times 100\% = 32,64\%$
		71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{3.329}{3.828} \times 100\% = 86,96\%$
		72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian	$\frac{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang di – selesaikan melalu Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial}}{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial}} \times 100\%$	$\frac{32}{34} \times 100\% = 94,12\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		
		73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Instruktur}} \times 100\%$	$\frac{148}{148} \times 100\% = 100\%$
		74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan}}{\text{Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja}} \times 100\%$	$\frac{36}{49} \times 100\% = 73,47\%$
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp680.227.382.652}}{\text{Rp1.103.811.457.314,63}} \times 100\% = 61,63\%$
		76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia < 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia < 18 th)}} \times 100\%$	$\frac{115}{239.858} \times 100\% = 0,05\%$
		77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	$\frac{181}{476.409} \times 100.000 = 37,99$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			penduduk perempuan)		
		78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{181}{181} \times 100\% = 100\%$
		79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$	$\frac{253.478}{259.445} \times 100\% = 97,7\%$
9	Pangan	80	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ <p> Σ kebutuhan pangan = konsumsi per kapita per tahun x Σ penduduk = 74,5 kg x 949.325 jiwa = 70.724.713 </p>	$\frac{5.036.000}{70.724.712,50} \times 100\% = 7,12\%$
		81	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak	Tidak Ada

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
10	Pertanahan	82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{165.884}{165.884} \times 100 \% = 100 \%$
		83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{1.798,82}{2.509} \times 100 \% = 71,69 \%$
		84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{165.884}{165.884} \times 100 \% = 100 \%$
		85	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	$\frac{28.735}{122} \times 100 \% = 23.553,28 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		86	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100\%$	$\frac{820.737}{1.040.988} \times 100 \% = 78,84 \%$
		87	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$
		88	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	$\frac{14}{14} \times 100 \% = 100 \%$
11	Lingkungan Hidup	89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		60,40
		90	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total Volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Volume timbunan sampah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{452.185,433}{608.731,642} \times 100 \% = 74,28 \%$
		91	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100 \%$	$\frac{4}{48} \times 100 \% = 8,33 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	$\frac{235.138}{239.858} \times 100 \% = 98,03 \%$
		93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	$\frac{718.179}{721.647} \times 100 \% = 99,52 \%$
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$
		95	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		96	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	$\frac{1026}{1026} \times 100\% = 100\%$
		97	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$	$\frac{1140}{1140} \times 100\% = 100\%$
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5 \times \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	1,67
99		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran wanita usia 15 – 19 th}}{\text{jumlah penduduk wanita usia 15 – 19 th}} \times 1000$	10,56	
100		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{101.691}{139.938} \times 100\% = 72,67\%$	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		101	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber – KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	$\frac{14.757}{139.938} \times 100 \% = 10,55 \%$
15	Perhubungan	102	Rasio konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan</p>	$\left(\frac{13 \times 1}{23} \times 100 \right) + 0 = 56,52$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
				<p>penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>	
		103	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,39
16	Komunikasi dan Informatika	104	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		105	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	$\frac{15}{79} \times 100\% = 18,98\%$
		106	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{662.514}{949.325} \times 100\% = 69,79\%$
		107	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada, 6 Perbup
		108	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah	$\frac{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi kompetensi}} \times 100\%$	$\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			pengelolaan Dinas Kominfo		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{121}{292} \times 100\% = 41,44\%$
		110	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{23.246}{29.098} \times 100\% = 78,89\%$
		111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{117}{11.992} \times 100\% = 0,1\%$
		112	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{297}{314} \times 100\% = 94,59\%$
18	Penanaman Modal	113	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah investasi thn } n - \text{Jumlah investasi tahun } - 1) \text{ di kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1 \text{ di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{938.371.029.012 - 666.256.881.966,05}{666.256.881.966,05} \times 100\% = 40,84\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
19	Kepemudaan dan Olahraga	114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.500}{196.809} \times 100 \% = 0,76 \%$
		115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{6.559}{196.809} \times 100 \% = 3,33 \%$
		116	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	14 Medali
		117	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan}}{\text{Jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi}} \times 100\%$	$\frac{300}{835} \times 100 \% = 35,93 \%$
20	Statistik	118	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{45}{45} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			pembangunan daerah		
		119	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$
21	Persandian	120	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	$\frac{450}{500} \times 100\% = 90\%$
22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	$\frac{73}{73} \times 100\% = 100\%$
		122	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	229 kali
23	Perpustakaan	123	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca	48,3

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		124	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	$x = a'+b'/a+b \times 100\%$ $x =$ persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan $a' =$ naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) $b' =$ koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) $a =$ koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) $b =$ koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	$\frac{7+0}{7} \times 100\% = 100\%$
		125	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}} \times 100\%$	$\frac{39.564}{113.897} \times 100\% = 34,74\%$
24	Kearsipan	126	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ $T =$ tingkat ketersediaan arsip $a =$ persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip $i =$ persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip $s =$ persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik $j =$ persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{75,9\% + 75,9\% + 62,8\% + 37,5\%}{4} = 63,02\%$
		127	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ $T =$ tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban $m =$ tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	$\frac{100\% + 100\% + 0 + 0 + 100\% + 100\%}{6} = 66,67\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>l = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	
URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan	128	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	13.243,45 ton
		129	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional}}{\text{Jumlah Tempat Pelelangan Ikan}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$
26	Pariwisata	130	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	$\frac{(\sum \text{wisatawan tahun } n - \sum \text{wisatawan tahun } n - 1)}{\sum \text{wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$	$\frac{4.041 - 3.461}{3.461} \times 100\% = 16,76\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			mancanegara per kebangsaan		
		131	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{(\Sigma \text{wisatawan tahun } n - \Sigma \text{wisatawan tahun } n - 1)}{\Sigma \text{wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$	$\frac{5.162.124 - 4.200.961}{4.200.961} \times 100 \% = 22,87 \%$
		132	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{41.235}{89.790} \times 100 \% = 45,92 \%$
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp } 3.079.305.000.000,00}{\text{Rp } 26.372.072.000.000,00} \times 100 \% = 11,68 \%$
		134	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PAD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp } 33.342.503.250,00}{\text{Rp } 505.929.472.001,63} \times 100 \% = 6,59 \%$
27	Pertanian	135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}}$	$\frac{2.244.370 \text{ kuintal}}{35.440 \text{ Ha}} = 63,33 \text{ kuintal/Ha}$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		136	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp}3,540,730.000.000,00}{\text{Rp}26,372,072.000.000,00} \times 100 \% = 13,43 \%$
		137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)- jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t - 1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t - 1)}} \times 100\%$	$\frac{1 - 2}{2} \times 100 \% = - 50 \%$
28	Energi Sumber Daya Mineral	138	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	100 %
29	Perdagangan	139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp}2.315.802.000.000,00}{\text{Rp}26.372.072.000.000} \times 100 \% = 8,78 \%$
		140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{156}{233} \times 100 \% = 66,95 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
		141	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ <p>Pupuk Urea</p> $\frac{9.117}{11.549} \times 100 \% = 78,94 \%$ <p>Pupuk ZA</p> $\frac{2.770,15}{4.028,79} \times 100 \% = 68,76 \%$ <p>Pupuk SP-36</p> $\frac{1.103,20}{3.323,53} \times 100 \% = 33,19\%$ <p>Pupuk Phonska</p> $\frac{7.053,70}{10.921,83} \times 100 \% = 64,58 \%$ <p>Pupuk Organik</p> $\frac{1.504,56}{10.921,83} \times 100 \% = 13,78 \%$	$\frac{78,94 \% + 68,76\% + 33,19\% + 64,58\% + 13,78\%}{5}$ $= 51,85 \%$
		142	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{21.314}{216.381} \times 100 \% = 9,8 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			tera sah yang berlaku		
30	Perindustrian	143	Pertambahan jumlah Industri kecil dan Menengah di kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - 1)}{\text{Jumlah industri besar tahun } n - 1} \times 100\%$	$\frac{24.359 - 23.535}{23.535} \times 100 \% = 3,50 \%$
		144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	$\frac{\text{Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten}}{\text{Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{57}{6.748} \times 100 \% = 0,84 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100 %
		147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
31	Transmigrasi	148	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	1 lokasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	Ada / tidak *)
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	$\frac{\text{Penjabaran program RPJMD dalam RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	$\frac{169}{169} \times 100\% = 100\%$
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 317.500.489.954,00}}{\text{Rp2.284.063.006.481,63}} \times 100\% = 13,90\%$
		4	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp505.929.472.001,63}}{\text{Rp1.015.317.383.728,13}} \times 100\% = 49,83\%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$ (normalisasi)
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,18
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{0}{330} \times 100 \% = 0 \%$
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{330}{2163} \times 100 \% = 14,33 \%$

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp}219.943.385.932,71}{\text{Rp}1.103.811.457.314,63} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 19,93 %</p>
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{135}{3.302} \times 100\% = 4,08\%$
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{135}{3.085} \times 100\% = 4,25\%$
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p style="text-align: center;">(normalisasi)</p>
		14	Assets management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Ya

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	3. Ya
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi SiLPA}}{\text{Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp}233.569.667.714,40}{\text{Rp}2.165.651.760.352,96} \times 100\% = 10,79\%$
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp}4.062.242.080,00}{\text{Rp}3.750.126.215,00} \times 100\% = 108,32\%$
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		1			12 Keg.

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
			Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4 Keg.